

Kurniawan Prambudi Utomo, S. E, M. M
M. Aziz Winardi N, S. T, M. M
DR. Suhardoyo, S. E, M. M
Mic Finanto Ario Bangun, S. Psi, M. Si



Keberlanjutan UMKM

di Era Pembangunan Infrastruktur
terhadap Profitabilitas dan Insolvensi



Keberlanjutan UMKM

di Era Pembangunan Infrastruktur terhadap Profitabilitas dan Insolvensi

Ditengah meluasnya pembangunan infrastruktur berskala nasional di Indonesia, UMKM menghadapi dilema antara peluang pertumbuhan dan ancaman keberlanjutan. Buku "Keberlanjutan UMKM di Era Pembangunan Infrastruktur terhadap Profitabilitas dan Insolvensi" akan mengupas secara mendalam bagaimana proyek-proyek besar pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan tol, bendungan yang berada di kota-kota besar di Indonesia termasuk kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mempengaruhi profitabilitas, daya saing, serta risiko kebangkrutan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Menggunakan pendekatan IPAT (*Impact, Population, Affluence, Technology*) dan analisis ekonometrik, buku ini mengungkap faktor-faktor yang menentukan apakah UMKM mampu bertahan atau justru tergerus oleh arus pembangunan infrastruktur. Dilengkapi dengan kasus lapangan, studi empiris, dan rekomendasi strategis, buku ini menawarkan solusi konkret bagi pelaku usaha, pemerintah, dan akademisi untuk membangun UMKM yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Sebuah bacaan wajib bagi siapa pun yang peduli terhadap masa depan ekonomi lokal di era transformasi infrastruktur dan digitalisasi nasional, selamat membaca.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**KEBERLANJUTAN UMKM
DI ERA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP PROFITABILITAS
DAN INSOLVENSI**

**Kurniawan Prambudi Utomo, S. E, M. M
M. Aziz Winardi N, S. T, M. M
DR. Suhardoyo, S. E, M. M
Mic Finanto Ario Bangun, S. Psi, M. Si**



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**KEBERLANJUTAN UMKM
DI ERA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP PROFITABILITAS DAN INSOLVENSI**

Penulis : Kurniawan Prambudi Utomo, S. E, M. M
M. Aziz Winardi N, S. T, M. M
DR. Suhardoyo, S. E, M. M
Mic Finanto Ario Bangun, S. Psi, M. Si

Editor : Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Reni Oktavianti

ISBN : 978-634-271-002-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2025**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “**Keberlanjutan UMKM di Era Pembangunan Infrastruktur terhadap Profitabilitas dan Insolvensi**” ini dapat terselesaikan. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus optimisme terhadap dinamika pembangunan infrastruktur berskala besar yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, termasuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Namun, percepatan pembangunan infrastruktur sering menimbulkan dampak ganda: di satu sisi membuka akses pasar dan peluang pertumbuhan, di sisi lain memunculkan tantangan serius berupa gangguan lingkungan, pergeseran tata ruang, dan tekanan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, buku ini mencoba menghadirkan pembahasan menyeluruh mengenai keberlanjutan UMKM. Buku ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat utama. Pertama, sebagai sumber rujukan akademik bagi penulis dan mahasiswa yang menekuni bidang ekonomi pembangunan, lingkungan, dan UMKM. Kedua, sebagai panduan praktis bagi pelaku usaha dalam merumuskan strategi adaptasi terhadap pembangunan infrastruktur. Ketiga, sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang program pemberdayaan UMKM yang berbasis data dan berkelanjutan.

Meski demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pembangunan Infrastruktur | 1 |
| B. Dampak terhadap UMKM..... | 6 |
| C. Pentingnya Keberlanjutan UMKM..... | 11 |
| D. Tantangan dan Adaptasinya | 16 |
| BAB 2 UMKM SEBAGAI PILAR EKONOMI..... | 22 |
| A. Pilar Ekonomi dan Agen Perubahan..... | 22 |
| B. Keberlanjutan UMKM | 30 |
| C. Pilar Utama Keberlanjutan..... | 36 |
| BAB 3 PRINSIP KEBERLANGSUNGAN UMKM..... | 39 |
| A. Prinsip Utama Keberlanjutan | 39 |
| B. Aksesibilitas, Distribusi, dan Pasar | 44 |
| C. Perubahan Pola Usaha | 49 |
| BAB 4 PROFITABILITAS KEBERLANJUTAN UMKM..... | 54 |
| A. Ukuran Profitabilitas..... | 54 |
| B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi | 59 |
| C. Dinamika Pasar | 61 |
| BAB 5 RISIKO KEBANGKRUTAN | 68 |
| A. Prinsip Risiko Kebangkrutan..... | 68 |
| B. Peran Ekonometrika pada UMKM..... | 71 |
| C. Pengukuran Kinerja UMKM..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 77 |
| GLOSARIUM..... | 84 |
| TENTANG PENULIS | 86 |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 UMKM terdampak pembangunan infrastruktur IKN....23

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Peta UMKM KIPP IKN | 2 |
| Gambar 2.1 UMKM di sekitaran IKN..... | 30 |
| Gambar 2.2 UMKM di IKN | 31 |

BAB

1

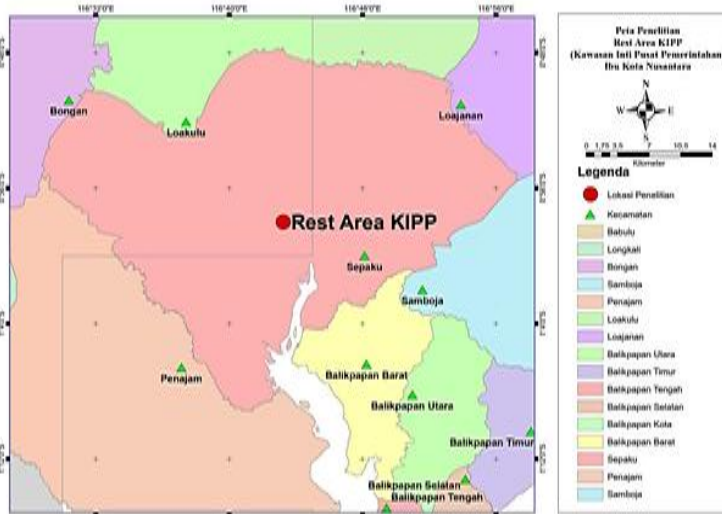
PENDAHULUAN

A. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus berlanjut sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), merupakan kunci pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (Paramananda et al., 2024). Terdiri dari Kawasan Pengembangan IKN seluas 199.962 ha, Kawasan IKN seluas 56.180 ha, dan Kawasan Pusat Pemerintahan Inti seluas 6.596 ha (Supratman dkk., 2025). Salah satu megaprojek strategis nasional adalah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, khususnya Kawasan Pusat Pemerintahan Inti (KIPP). Pembangunan infrastruktur menjadi agenda strategis nasional yang tidak sekadar menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga merekayasa peta ekonomi Indonesia. Proyek-proyek berskala besar mulai dari Jalan Tol Trans-Jawa, Tol Balikpapan–IKN, jaringan pelabuhan terpadu, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didesain untuk menurunkan biaya logistik, memperkuat rantai pasok, dan menciptakan pusat pertumbuhan baru. Infrastruktur diharapkan menjadi akselerator daya saing, memikat investasi, dan menstimulasi inovasi lintas sektor.

Akan tetapi, sejarah pembangunan di banyak negara menunjukkan bahwa modernisasi infrastruktur tidak pernah netral: ia membawa dampak asimetris, membuka peluang

sekaligus menimbulkan disrupsi bagi aktor-aktor ekonomi, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM, yang selama ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, menjadi kelompok paling terdampak. Peningkatan aksesibilitas wilayah memang memunculkan peluang pasar dan memperluas jangkauan distribusi. Tetapi dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, mereka harus bersaing dengan pemain skala besar yang lebih siap memanfaatkan infrastruktur baru. Di sisi lain, perubahan tata ruang dan relokasi lahan seringkali menekan keberadaan usaha tradisional. Fenomena ini terlihat di koridor ekonomi baru mulai dari Jawa hingga Kalimantan Timur di mana pelaku UMKM di sekitar proyek jalan tol atau kawasan IKN harus beradaptasi cepat agar tidak tergusur arus modernisasi. Berikut peta kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimana ada beberapa UMKM di rest area IKN.



Gambar 1.1 Peta UMKM KIPP IKN

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN terletak di dalam Kabupaten Penajam Paser Utara di Kecamatan

Sepaku. Sebagian besar penduduk di sekitaran UMKM bergerak di sektor kuliner, jasa, dan pertanian olahan. Posisi strategis kawasan ini sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru membuka peluang besar dan Wilayah IKN menjadi masa depan Indonesia, terutama dalam sektor logistik dan agrowisata. Namun, keberlanjutan UMKM tetap menghadapi tantangan seperti rendahnya legalitas usaha, konversi lahan, dan ketidakpastian akses usaha.

Isu keberlanjutan menjadi semakin kompleks ketika dimensi lingkungan, sosial, dan teknologi turut diperhitungkan. Transformasi infrastruktur sering meningkatkan intensitas penggunaan lahan, konsumsi energi, dan emisi karbon, yang pada gilirannya menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan secara finansial, tetapi juga beroperasi dengan kesadaran lingkungan. Di saat yang sama, digitalisasi ekonomi dari e-commerce, sistem pembayaran elektronik, hingga platform pemasaran daring menghadirkan peluang efisiensi biaya dan akses pasar lintas batas, namun menuntut kompetensi baru yang belum merata di kalangan pelaku UMKM. Ketidakmampuan beradaptasi dapat berujung pada penurunan profitabilitas bahkan insolvensi. Untuk memahami kerumitan ini, diperlukan kerangka analitis yang mampu memotret interaksi populasi, kemakmuran, dan teknologi terhadap dampak lingkungan dan ekonomi.

Literatur mengenai UMKM umumnya menyoroti akses pembiayaan, inovasi produk, atau strategi pemasaran digital, tetapi jarang mengaitkan keberlanjutan lingkungan dengan kinerja keuangan secara empiris, apalagi dalam konteks percepatan pembangunan infrastruktur. Padahal, pemahaman berbasis data sangat penting untuk merancang kebijakan yang adil dan efektif. Pemerintah membutuhkan peta risiko yang akurat, sementara pelaku UMKM memerlukan panduan strategis agar mampu meningkatkan profitabilitas sekaligus menekan potensi kebangkrutan. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan ilmiah sekaligus praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga pembiayaan, dan para pelaku UMKM.

Lebih jauh, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari panjang jalan atau megahnya gedung, tetapi dari sejauh mana ia menumbuhkan ekonomi lokal, menguatkan ketahanan UMKM, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

UMKM telah lama dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlahnya yang besar, penyerapannya terhadap tenaga kerja, serta kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menempatkan UMKM sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah, UMKM menghadapi dinamika baru yang tidak sederhana. Memahami kriteria UMKM yang dikaitkan dengan konsep kewirausahaan akan memudahkan pihak yang berwenang untuk melakukan pembinaan UMKM (Sri et al., 2019). Tujuan dari pembinaan UMKM adalah memajukan mitra UMKM binaan. Dari lembaga yang bernama koperasi yang alat produksi berupa UMKM, perlu dilakukan menindaklanjuti terkait produk baik berupa barang atau jasa, jadi fungsi pemasaran produk sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa pemasaran produk merupakan proses yang tergabung bersama dengan manufaktur, logistik transportasi, serta disain produk yang membentuk rantai nilai perusahaan. Inti pemasaran bagi setiap organisasi sendiri ialah dapat melampaui persaingan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan (Sahir, 2020).

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan koperasi merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Konsep Pemasaran Konsep pemasaran adalah orientasi manajemen yang menekankan pada kunci pencapaian tujuan organisasi, terdiri dari kemampuan organisasi menentukan kebutuhan dan keinginan target pasar yang dituju dan kemampuan organisasi dalam memenuhinya dengan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari para pesaing (Ritonga et al., 2020). Konsep pemasaran tidak terlepas dari pengelolaan bisnis, yang dikelola oleh pelaku usaha/umkm, oleh karenanya, setiap

pengelola dapat mempunyai sikap atau kemampuan menjual suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan, karena menjual merupakan masalah perorangan yang sifatnya kreatif, pekerjaan menjual merupakan keahlian yang tidak mungkin diganti dengan mesin.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota juga berperan signifikan dalam menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan jaringan pemasaran bagi UMKM. Di mana tugas UMKM melakukan pemasaran berupa produk barang dan jasa yang dibuat, (M. Y. Saleh & Said, 2019). Pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, hingga jaringan transportasi modern di satu sisi membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas akses pasar dan distribusi produk. Konektivitas yang semakin baik mendorong efisiensi logistik dan mempercepat arus barang maupun jasa. Akan tetapi, di sisi lain, transformasi ini menghadirkan tantangan serius berupa persaingan yang semakin ketat, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan kebutuhan adaptasi teknologi yang mendesak. Dalam konteks inilah isu keberlanjutan UMKM menjadi penting untuk dikaji. Tidak cukup bagi UMKM hanya bertahan dalam jangka pendek; mereka dituntut mampu berkembang secara berkelanjutan dengan mengelola profitabilitas sekaligus menghindari risiko insolvensi. Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana UMKM dapat menjaga keberlanjutan di tengah arus pembangunan infrastruktur yang masif?

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Faroman dkk., 2018), termasuk proyek pembangunan jalan tol (Ruas dkk., 2016). Termasuk infrastruktur transportasi lainnya (Saleh dkk., 2025) Seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan proyek strategis lainnya seiring dengan pertumbuhan inovasi teknologi (Cheng dkk., 2023; Zhou dkk., 2025). Di wilayah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

(Hidayat dkk., 2024.) Jalan tol di Kalimantan Timur, pertama jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki panjang 99,02 km yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Samarinda (Rezky dkk., 2023), kedua ruas jalan tol Balikpapan-IKN panjangnya kurang lebih 47 kilometer, melintasi Pulau Balang sepanjang 30 KM, sisi positifnya memudahkan logistik antar kota, sisi negatifnya memberikan dampak luar biasa bagi ekosistem (Hua dkk., 2021). Proyek ini tidak hanya berdampak pada aspek makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah pengembangan, yang merupakan faktor strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM mencatat bahwa lebih dari 64 juta unit UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Dira dkk., 2023; Wibowo & Aumeboonsuke, 2020), memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan penyedia lapangan kerja (Rodríguez-Gulías dkk., 2024).

B. Dampak terhadap UMKM

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur IKN memerlukan model yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas (Harta et al., 2020). Pemerintah menempatkan sektor infrastruktur sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini tercermin dalam berbagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana infrastruktur selalu menjadi prioritas utama untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Indonesia menyaksikan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara hingga energi, telekomunikasi, serta infrastruktur digital. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan kereta api dibangun secara masif untuk memperpendek jarak distribusi dan menekan biaya logistik nasional. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan jalan tol dan infrastruktur transportasi terbukti mampu menurunkan biaya logistik yang sebelumnya mencapai 23–24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi lebih efisien.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah memasuki fase percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak satu dekade terakhir, pemerintah menempatkan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi, dengan alokasi belanja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya fokus pada konektivitas fisik, kebijakan ini menggabungkan pendekatan pemerataan wilayah, transformasi digital, dan penguatan daya saing global. Proyek-proyek strategis seperti Jalan Tol Trans-Sumatra, Tol Balikpapan-IKN, kereta cepat Jakarta-Bandung, pelabuhan laut dalam di berbagai titik, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi simbol ambisi tersebut. Di sisi lain, kehadiran infrastruktur digital—misalnya jaringan serat optik Palapa Ring, ekspansi layanan 5G, dan pembangunan pusat data nasional menandai pergeseran paradigma pembangunan: dari sekadar membangun jalan dan jembatan menjadi membentuk ekosistem konektivitas yang menyeluruh, baik fisik maupun digital. Skala pembangunan yang luas membawa dampak ganda yang tidak dapat diabaikan. Secara makro, infrastruktur mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan biaya logistik, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Akses transportasi yang lebih cepat dan jaringan digital yang semakin andal memperpendek jarak antar daerah, memungkinkan distribusi barang dan jasa berlangsung lebih efisien. Kawasan-

kawasan yang sebelumnya terpencil mulai terintegrasi dalam rantai pasok nasional bahkan internasional.

Namun, pengalaman berbagai negara dan temuan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur tidak selalu merata. Pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada koridor yang langsung tersambung ke proyek strategis, sementara wilayah di luar jalur utama berpotensi mengalami ketertinggalan baru. Ketimpangan spasial ini menuntut kebijakan yang tidak hanya menekankan percepatan pembangunan, tetapi juga keadilan distribusi manfaatnya. Di tengah arus besar transformasi ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menempati posisi yang unik sekaligus rentan. UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sehingga keberlangsungan mereka sangat menentukan stabilitas ekonomi. Peningkatan konektivitas jelas membuka peluang besar: rantai pasok yang lebih singkat menurunkan biaya distribusi, pasar domestik dan global menjadi lebih mudah dijangkau, serta akses bahan baku menjadi lebih lancar.

Banyak UMKM yang mampu memanfaatkan momentum ini untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan kualitas produk. Namun, peluang tersebut disertai tantangan serius. Pertama, meningkatnya arus investasi dan masuknya pelaku usaha besar ke wilayah yang sama menciptakan persaingan yang ketat. UMKM yang tidak memiliki modal kuat atau jaringan pemasaran luas berisiko terdesak. Kedua, pembangunan fisik seperti jalan tol atau pelabuhan kerap mengubah tata ruang dan memaksa relokasi. Biaya pindah lokasi, kehilangan basis pelanggan lama, dan ketidakpastian izin usaha menjadi beban tambahan. Ketiga, kehadiran infrastruktur digital belum otomatis meningkatkan literasi teknologi di kalangan pelaku UMKM. Banyak usaha mikro di daerah yang masih menghadapi kendala modal, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya keterampilan digital untuk memanfaatkan peluang e-commerce, pemasaran daring, dan sistem pembayaran elektronik.

Dimensi keberlanjutan semakin memperluas tantangan. Pembangunan infrastruktur sering menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti peningkatan emisi karbon, konversi lahan, dan gangguan ekosistem. UMKM yang berada di sekitar proyek harus menyesuaikan proses produksi agar selaras dengan regulasi lingkungan, sekaligus merespons meningkatnya tuntutan konsumen terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan. Bagi banyak pelaku UMKM, integrasi prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) bukan hanya keharusan moral, tetapi menjadi prasyarat untuk memperoleh dukungan pembiayaan dan mempertahankan pangsa pasar jangka panjang. Pembangunan infrastruktur memengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kemakmuran, dan adopsi teknologi di wilayah terdampak. Perubahan pada ketiga aspek tersebut akan menentukan besarnya dampak lingkungan dan ekonomi, termasuk terhadap kinerja UMKM.

UMKM menjadi landasan penting bagi perumusan strategi keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari panjang jalan, jumlah jembatan, atau kapasitas pelabuhan, tetapi juga dari sejauh mana infrastruktur mampu menumbuhkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat daya tahan UMKM. Tanpa perhatian yang serius pada keberlanjutan, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menciptakan ketimpangan baru. Selain transportasi fisik, pembangunan infrastruktur juga menyasar sektor energi dan digital. Listrik menjadi kebutuhan vital bagi dunia usaha, termasuk UMKM, sehingga program elektrifikasi hingga pelosok desa menjadi faktor penting dalam mendukung produktivitas. Di sisi lain, pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi, Palapa Ring, dan infrastruktur telekomunikasi lainnya membuka akses lebih luas bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital, baik dalam pemasaran, pembayaran, maupun inovasi produk.

Fakta yang tidak terbantahkan adalah peran Usaha kecil dan menengah (UKM) yang berjumlah sekitar 36,8 juta (99,9 persen) dengan kontribusi mereka dalam pembentukan PDB

pada tahun 1998 sekitar 58,2 persen. Sementara jumlah koperasi sebanyak 59,4 ribu unit merupakan pendukung utama pembiayaan usaha mikro dan kecil. Dampak krisis ekonomi pada dunia perbankan relatif kurang berpengaruh bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) karena akses UMKK terhadap perbankan kala itu sangat terbatas. Modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha UMKMK lebih banyak mengandalkan pada hasil usaha sendiri. Mereka menjadi katup pengaman yang tangguh di tengah kenyataan mekanisme pasar yang distortif, termasuk regulasi dan retribusi yang dasar hukumnya kurang kuat dan proses perizinan yang kurang transparan serta lemahnya komitmen dalam mengembangkan UMKMK (Wilantara & Indrawan, 2016). Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan hanya sektor yang dominan dalam jumlah unit usaha, tetapi juga pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional jika dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan struktur ketenagakerjaan. Berbagai data resmi dari lembaga pemerintah dan internasional menunjukkan bahwa sektor ini merupakan penggerak utama roda perekonomian Indonesia, bahkan dalam kondisi normal maupun krisis.

Namun, pembangunan infrastruktur tidak hanya membawa dampak positif, melainkan juga menghadirkan sejumlah tantangan. Di wilayah perkotaan, misalnya, pembangunan jalan tol baru dapat mendorong munculnya pusat-pusat ekonomi baru sekaligus menyingkirkan pelaku usaha kecil yang tidak siap menghadapi perubahan arus konsumen. Di wilayah pedesaan, pembangunan infrastruktur transportasi membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi sekaligus memperbesar risiko kompetisi dengan produk-produk dari luar daerah. Artinya, manfaat infrastruktur tidak selalu terdistribusi secara merata, dan UMKM menjadi salah satu aktor yang paling rentan merasakan dampaknya. Dalam kerangka makroekonomi, pembangunan infrastruktur memang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan nasional. Akan tetapi, dalam kerangka mikro, dampaknya terhadap UMKM

sangat bervariasi, tergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam mengadaptasi perubahan. UMKM yang mampu memanfaatkan akses pasar baru, memperbaiki efisiensi produksi, dan mengadopsi teknologi akan memperoleh keuntungan besar dari pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, UMKM yang kurang adaptif justru berpotensi menghadapi penurunan profitabilitas, bahkan ancaman insolvensi.

Oleh karena itu, konteks pembangunan infrastruktur nasional perlu dipahami tidak hanya sebagai proyek fisik semata, melainkan sebagai fenomena sosial-ekonomi yang kompleks. Pembangunan ini membawa implikasi yang luas terhadap ekosistem usaha, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan latar inilah pembahasan mengenai keberlanjutan UMKM di tengah pembangunan infrastruktur menjadi sangat relevan, karena mampu mengungkap sejauh mana pelaku usaha kecil dapat bertahan, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan struktural yang sedang berlangsung.

C. Pentingnya Keberlanjutan UMKM

Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam menjaga vitalitas perekonomian lokal. Di banyak daerah, UMKM bukan hanya aktor ekonomi, melainkan juga penggerak ekosistem sosial, penyerap tenaga kerja, dan penjaga identitas budaya. Ketika UMKM bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan, dampak positifnya menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat: meningkatkan pendapatan rumah tangga, mengurangi pengangguran, dan memicu perputaran ekonomi yang lebih merata.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi bukti konkret. Di sejumlah provinsi, sektor ini menyumbang lebih dari separuh nilai tambah perekonomian daerah, jauh melampaui peran industri besar. UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi, mampu menyesuaikan produk dan layanan dengan selera lokal, serta

memanfaatkan sumber daya setempat. Karakter ini menjadikan UMKM sebagai penyangga utama ketika perekonomian nasional menghadapi guncangan, seperti krisis finansial atau pandemi. Dalam situasi semacam itu, UMKM terbukti lebih cepat pulih karena skala usahanya yang lincah dan kedekatannya dengan konsumen. Namun, keberlanjutan UMKM tidak sekadar berarti bertahan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena perlunya sinergi antara pelaku UMKM, pemerintah dan swasta untuk mendukung pengembangan kapasitas penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) handal dan efektif.

Keberlanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. UMKM yang mengabaikan prinsip tersebut berisiko kehilangan akses pasar, terutama ketika konsumen semakin peduli pada praktik bisnis ramah lingkungan dan etis. Integrasi nilai-nilai keberlanjutan—seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan rantai pasok yang adil—menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing. Keberlanjutan juga terkait erat dengan ketahanan perekonomian lokal. UMKM yang sehat menciptakan efek berganda: mereka membeli bahan baku dari pemasok lokal, mempekerjakan tenaga kerja setempat, dan menyalurkan keuntungan kembali ke komunitas. Perputaran ekonomi yang dihasilkan mengurangi ketergantungan pada investasi eksternal dan memupuk kemandirian daerah.

Di wilayah yang mengalami pembangunan infrastruktur besar-besaran, UMKM berperan sebagai jembatan antara pertumbuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Mereka dapat menjadi penyedia jasa pendukung konstruksi, penyedia kebutuhan konsumsi pekerja, hingga penggerak wisata baru yang muncul berkat peningkatan aksesibilitas. Di sisi kebijakan, keberlanjutan UMKM menjadi kunci bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Program pendampingan, akses pembiayaan hijau, dan peningkatan kapasitas digital perlu diarahkan agar UMKM mampu mengelola risiko, memperluas pasar, dan menjaga

profitabilitas di tengah perubahan cepat. Ketika UMKM lokal berhasil mempertahankan daya saing, perekonomian daerah akan lebih resilien terhadap fluktuasi global dan disrupsi teknologi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional, menegakkan keberlanjutan UMKM bukan hanya upaya melindungi sektor kecil, melainkan investasi jangka panjang untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Infrastruktur fisik yang megah tidak akan optimal jika tidak disertai penguatan pelaku usaha lokal yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan memadukan strategi adaptasi, inovasi teknologi, dan komitmen pada prinsip lingkungan dan sosial, UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian lokal yang tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh seiring transformasi besar yang tengah berlangsung. Hanim dan Noorman (2018). Menjelaskan bahwa peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendukung dan wajib mendorong UMKM agar maju yaitu dengan:

1. Menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
2. Mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
3. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
4. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta unit UMKM menyumbang sekitar 61% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Angka ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama yang menopang struktur perekonomian nasional maupun lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM menjadi isu strategis yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberlanjutan UMKM mengandung arti bahwa usaha kecil tidak hanya mampu bertahan dalam

jangka pendek, tetapi juga memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang secara konsisten dalam jangka panjang. Hal ini mencakup kemampuan menjaga profitabilitas, mengelola risiko usaha, serta mengantisipasi ancaman insolvensi.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keberlanjutan UMKM semakin penting karena perubahan lingkungan bisnis yang dihasilkan dapat menguntungkan sekaligus merugikan. Di tingkat lokal, keberlanjutan UMKM memiliki implikasi yang sangat luas. Pertama, UMKM menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, UMKM berperan sebagai penyedia produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga menjaga stabilitas ekonomi domestik. Ketiga, UMKM berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendapatan keluarga, keterampilan, dan kemandirian ekonomi. Namun, pentingnya keberlanjutan UMKM tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan budaya. Banyak UMKM yang berbasis pada potensi lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, maupun jasa berbasis komunitas. Jika keberlanjutan UMKM ini terjaga, maka secara tidak langsung turut melestarikan identitas budaya serta memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Sebaliknya, apabila UMKM tidak mampu bertahan menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, maka yang terancam bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya lokal.

Beberapa UMKM juga diketahui mengalami dampak positif dan negatif, termasuk tekanan likuiditas dan penurunan laba bersih akibat gangguan rantai pasok dan akses pelanggan. Namun, UMKM yang beradaptasi dengan teknologi digital dan strategi diversifikasi menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) memiliki beberapa tenant UMKM ternama, salah satunya Amplang. Namun, UMKM lain juga mulai bermunculan, seperti Pawon Prona dengan bisnis kateringnya, Mamapapa Bakery dengan roti dan kue-kue lainnya, serta Chumbucked dengan bisnis kafe,

camilan amplang, dan makanan bekunya. Amplang juga merasakan dampak pembangunan infrastruktur (Smith Purba, 2024).

Di sekitar jalan menuju IKN di Kecamatan Sepaku, banyak yang mulai menekuni usaha kerupuk amplang. Salah satunya adalah Okananti, 50 tahun, seorang produsen amplang bandeng "Jo Noleh" yang tinggal di Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, yang termasuk dalam wilayah pengembangan IKN. Dalam sehari, produksinya sekitar 8 kg atau 32 bungkus. Dalam sebulan, ia bisa memproduksi lebih dari 1.000 bungkus, dan semuanya ludes terjual. Sejak IKN berdiri, pendapatannya meningkat tiga kali lipat. Sejak IKN dibangun, perekonomian masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Kami sangat merasakan dukungan dari pemerintah (Indonesia, 2023).

Namun, UMKM juga merupakan sektor yang paling rentan terhadap dampak lingkungan akibat pembangunan infrastruktur skala besar (Meng dkk., 2025). Degradasi lingkungan dapat mengurangi produktivitas, meningkatkan biaya operasional, dan bahkan menyebabkan relokasi atau penutupan usaha kecil dan menengah (Chetty dkk., 2024). Terutama jika tidak ada mitigasi risiko yang tidak dapat dipertahankan (Joy-Camacho dan Thornhill, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana keberlanjutan UMKM dapat dipertahankan dalam konteks pembangunan infrastruktur melalui pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi kependudukan, kesejahteraan, dan teknologi. Model IPAT dapat berperan sebagai peredam guncangan dalam menjaga kinerja bisnis.

Keberlanjutan UMKM juga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Infrastruktur yang dibangun secara besar-besaran seharusnya tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, melainkan juga memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh bersama. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM harus dipandang sebagai prasyarat

penting dalam menciptakan keseimbangan pembangunan. Dengan melihat signifikansinya dalam menopang perekonomian lokal, keberlanjutan UMKM dapat dipahami sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas nasional. Pembahasan ini menekankan bahwa tanpa keberlanjutan UMKM, manfaat pembangunan infrastruktur tidak akan optimal dan justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Maka, menjaga dan menguatkan keberlanjutan UMKM merupakan bagian integral dari upaya memperkuat perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Tantangan dan Adaptasinya

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini berada di persimpangan yang menuntut ketangguhan lebih besar dibanding masa-masa sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang meluas di berbagai daerah memang membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi sekaligus mempertebal tantangan mendasar yang sejak lama dihadapi: menjaga profitabilitas, menghindari risiko insolvensi, dan beradaptasi dengan percepatan digitalisasi. Tekanan terhadap profitabilitas terlihat dari margin keuntungan yang kian tipis. Skala usaha yang kecil, keterbatasan akses bahan baku, dan daya tawar yang lemah membuat banyak UMKM sulit menekan biaya produksi. Ketika jalan tol, pelabuhan, dan jalur distribusi baru menghadirkan pesaing dari luar daerah, persaingan harga menjadi semakin ketat. Di beberapa wilayah yang menjadi pusat pembangunan, sewa lahan dan harga properti melonjak, memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mempertahankan lokasi strategis. Kenaikan harga energi dan fluktuasi biaya logistik mempersempit ruang laba, sehingga kemampuan untuk mempertahankan profitabilitas jangka panjang pun melemah.

Dampak lanjutan dari tekanan profit adalah meningkatnya risiko insolvensi. Banyak UMKM menggantungkan keberlangsungan operasional pada arus kas harian; sedikit gangguan pendapatan dapat langsung memengaruhi kemampuan membayar utang atau menutup

biaya tetap. Relokasi akibat perubahan tata ruang, keterlambatan proyek, atau gangguan pasokan bisa memutus aliran pendapatan mendadak. Sementara itu, akses terhadap kredit formal masih terbatas, terutama bagi pelaku usaha yang tidak memiliki agunan atau catatan keuangan yang rapi. Kondisi ini mendorong sebagian UMKM mengambil pinjaman informal berbunga tinggi, yang dalam jangka panjang justru memperbesar beban keuangan dan mempercepat ancaman kebangkrutan ketika pendapatan tidak stabil.

Di sisi lain, transformasi digital membawa peluang sekaligus kesenjangan baru. Platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran elektronik dapat memperluas pasar serta menekan biaya promosi. Namun, literasi digital yang belum merata, keterbatasan perangkat, dan minimnya modal investasi membuat sebagian besar UMKM tertinggal. Di banyak daerah yang baru menikmati internet berkecepatan tinggi, hanya sebagian pelaku usaha yang mampu memanfaatkan peluang ini. Perubahan perilaku konsumen yang bergerak cepat ke arah belanja daring dan transaksi tanpa tunai semakin menuntut kesiapan teknologi yang tidak semua UMKM miliki. Ketiga tantangan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Profitabilitas yang lemah mengurangi kemampuan berinvestasi dalam teknologi, sehingga adaptasi digital tertunda. Keterlambatan digitalisasi membuat pangsa pasar menyusut, pendapatan menurun, dan risiko gagal bayar meningkat. Sebaliknya, keberhasilan memanfaatkan teknologi dapat menekan biaya distribusi, memperluas jangkauan penjualan, dan memperkuat ketahanan finansial. Namun langkah ke arah itu memerlukan investasi awal, pendampingan, serta dukungan pembiayaan yang tidak sedikit.

Pembangunan infrastruktur nasional, baik fisik maupun digital, mempercepat dinamika ini. Jalan dan pelabuhan memangkas waktu distribusi, tetapi juga mempertemukan UMKM lokal dengan kompetitor berskala besar. Sementara itu, jaringan serat optik dan layanan 5G membuka peluang perdagangan lintas daerah, tetapi tanpa peningkatan

keterampilan dan strategi pemasaran, potensi tersebut tidak otomatis menjejakan pelaku usaha kecil. Di banyak lokasi, percepatan pembangunan justru memicu kenaikan harga tanah dan pergeseran pusat aktivitas ekonomi, memaksa UMKM beradaptasi dalam waktu singkat. Situasi tersebut menuntut kebijakan dan strategi yang lebih menyeluruh. Literasi keuangan dan manajemen risiko perlu diperkuat agar pelaku usaha mampu menjaga arus kas dan menekan risiko insolvensi.

Pendampingan dan pelatihan digital menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang pasar daring. Kebijakan tata ruang yang berpihak pada usaha kecil dapat melindungi mereka dari spekulasi lahan dan relokasi mendadak. Pemantauan berbasis data, termasuk penggunaan model IPAT dengan pendekatan ekonometrik, dapat membantu mengidentifikasi faktor paling krusial yang memengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan, sehingga intervensi pemerintah dan lembaga keuangan lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah terintegrasi, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah arus besar pembangunan infrastruktur. Profitabilitas yang stabil, ketahanan menghadapi insolvensi, dan adaptasi digital yang efektif menjadi kunci agar sektor ini tetap menjadi pilar perekonomian lokal sekaligus motor pertumbuhan nasional di era transformasi yang serba cepat.

Keberlanjutan UMKM secara umum juga dilihat dari perspektif akses permodalan, digitalisasi, teknologi digital (Zhao, 2024), atau hanya di sektor industri atau perkebunan besar, dan infrastruktur (Loureiro dkk., 2020), seperti bendungan, gedung, dan jalan tol (Anisa dkk., 2021). Sementara itu, dampak pembangunan infrastruktur terhadap keberlanjutan UMKM juga bisa dilihat melalui degradasi lingkungan yang mempengaruhi profitabilitas dan risiko insolvensi (Chontanawat, 2018). Adapun keberlanjutan ini bisa dilihat dari tiga teori utama yaitu pertama, Teori Modernisasi Ekologis (Julkovski dkk., 2021), untuk memahami bagaimana kebijakan dan inovasi mendorong harmonisasi antara pembangunan infrastruktur dan lingkungan untuk menilai kapasitas

keberlanjutan UMKM. Kedua, Biaya Kesulitan Keuangan (Purnanandam, 2008), untuk menilai tekanan dampak lingkungan terhadap keuangan UMKM dan risiko kebangkrutan melalui Altman Z-score, untuk profitabilitas dan kebangkrutan. Ketiga, Teori Pembangunan Daerah (Dawkins, 2003), untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada pelaku di kawasan UMKM (Li dkk., 2018).

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, UMKM tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menghambat keberlanjutan usahanya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan tiga aspek utama, yaitu profitabilitas, risiko insolvensi, dan kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi. Ketiganya saling berkaitan dan menentukan apakah sebuah UMKM mampu bertahan di tengah perubahan struktural akibat pembangunan infrastruktur maupun dinamika pasar global.

1. Profitabilitas

Profitabilitas mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan keuntungan secara konsisten dari kegiatan usahanya. Bagi UMKM, menjaga tingkat profitabilitas bukanlah perkara mudah. Skala usaha yang kecil, keterbatasan modal, serta akses pasar yang masih sempit membuat margin keuntungan relatif tipis. Selain itu, banyak UMKM yang masih bergantung pada pola usaha tradisional tanpa manajemen keuangan yang terstruktur, sehingga sulit untuk melakukan efisiensi biaya. Pembangunan infrastruktur memang membuka peluang baru berupa akses pasar yang lebih luas, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan kompetisi yang lebih ketat, baik dari sesama UMKM maupun dari perusahaan besar. Jika UMKM tidak mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produknya, maka potensi untuk mempertahankan profitabilitas akan semakin sulit.

2. Risiko Insolvensi

Selain profitabilitas, masalah insolvensi atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial juga menjadi ancaman serius bagi UMKM. Kondisi ini biasanya dipicu oleh lemahnya arus kas, tingginya biaya operasional, serta ketidakmampuan mengelola utang. UMKM yang rentan terhadap fluktuasi permintaan pasar akan lebih mudah terjerat risiko insolvensi ketika terjadi penurunan penjualan atau krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur dapat memperparah risiko insolvensi apabila UMKM tidak mampu beradaptasi. Misalnya, ketika jalur distribusi baru justru mengalihkan konsumen ke wilayah lain, atau ketika persaingan meningkat drastis akibat masuknya produk-produk dari luar daerah. Tanpa strategi adaptif, UMKM akan kesulitan menjaga stabilitas keuangan dan berisiko mengalami kebangkrutan.

3. Adaptasi Digital

Di era transformasi digital, kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi faktor kunci keberlanjutan UMKM. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat hubungan dengan konsumen. Namun, kenyataannya banyak UMKM masih menghadapi hambatan dalam mengadopsi teknologi digital, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital, maupun minimnya infrastruktur pendukung.

Pembangunan infrastruktur digital seperti jaringan internet cepat dan sistem pembayaran elektronik memberikan peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh. Di sisi lain, kesenjangan digital antara pelaku usaha yang melek teknologi dan yang belum siap dapat memperlebar disparitas dalam keberlanjutan usaha. UMKM yang lambat beradaptasi dengan digitalisasi akan semakin tertinggal, bahkan terancam kehilangan pangsa pasar. Secara keseluruhan, permasalahan UMKM terkait profitabilitas, risiko insolvensi, dan adaptasi digital perlu dipandang secara holistik. Ketiga

aspek ini tidak hanya menentukan daya tahan usaha, tetapi juga memengaruhi kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, hal ini bisa jadi cara mengungkap sejauh mana faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan keberlanjutan UMKM, sehingga dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat untuk memperkuat posisi UMKM di tengah perubahan ekonomi yang dinamis.

BAB 2

UMKM SEBAGAI PILAR EKONOMI

A. Pilar Ekonomi dan Agen Perubahan

Dalam teori ekonomi pembangunan, UMKM dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang menjaga keseimbangan struktur industri sekaligus menjadi motor pertumbuhan wilayah. Konsep *linkage effect* menegaskan kemampuan UMKM menciptakan efek pengganda: membuka lapangan kerja, menstimulasi permintaan bahan baku lokal, dan memperkuat konsumsi rumah tangga. Pandangan ini menempatkan UMKM bukan sekadar entitas kecil yang melengkap sektor besar, melainkan aktor strategis yang mendorong pertumbuhan inklusif, khususnya di daerah yang sedang mengalami percepatan pembangunan infrastruktur. Perspektif kewirausahaan modern menambahkan lapisan pemahaman melalui konsep *dynamic capabilities*. UMKM yang mampu mengidentifikasi peluang baru, berinovasi, dan belajar secara berkelanjutan akan lebih tangguh menghadapi gejolak eksternal. Dalam konteks pembangunan infrastruktur yang membawa perubahan cepat pada pola distribusi, biaya logistik, dan preferensi pasar, kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan. Berikut daftar UMKM yang ada di rest area kawasan IKN tahun 2025 yaitu:

Tabel 2.1 UMKM terdampak pembangunan infrastruktur IKN

| No | Nama UMKM | Nama Pemilik | Jenis Usaha | Lokasi Usaha |
|----|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Dapoer Azizah | Hastuti | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 2 | Koperasi Kesepakatan masyarakat Sepaku | Edi Suryani | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara A |
| 3 | Bulau Sayang | Ida Tuti Rusintan | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara A |
| 4 | Sepaku Clothing | Partini Tini Ritmik | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara A |
| 5 | Legato Gitar | Dadang Darmawan | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 6 | Hidroponik Nusantara | Sri Sudarwati | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 7 | Suraa Arts | Suradi | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara A |
| 8 | Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku | Supian Nur | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 9 | Kedai Gibran | Lailatul Rahmawati | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 10 | Kedai Qita | Sarinah | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 11 | Enkitchen | Endah Sulistyaningsih | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 12 | Pondok Nusantara | Miftachur Rahma | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 13 | Warung Ngelok Balik | Yati Dahlia | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 14 | Duo Lestary | May Hartatik | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 15 | Alifa Cake | Alifa | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 16 | Ginger Coffe 120 | Yoehana | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |

| No | Nama UMKM | Nama Pemilik | Jenis Usaha | Lokasi Usaha |
|----|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | Mie Ayam Bakso Solo Lek No | Kasno | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 18 | Kafe Sepaku 4 | Didik Setiawan | Makanan & Minuman | Rest Area Nusantara A |
| 19 | WP. Buana Nusantara | Anwar Sadat | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 20 | Depot 88 | Erwin | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 21 | RM. Anugerah | Ivan Wowling | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 22 | Kuta Rekan Tatau | Eko Supriadi | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 23 | RM Bawi Ngaju | Everencia Rentania | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 24 | Kedai Zoya | Ety Nurhayati | Makanan | Rest Area Nusantara B |
| 25 | Nyot-Nyot Fresh Drink | Saktyasita Dewi P | Minuman | Rest Area Nusantara B |
| 26 | Cashier | - | Pembayaran | Rest Area Nusantara B |
| 27 | UMKM Sambar Berjaya | Juliana | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 28 | Koperasi Kesultanan Paser Nusantara | Ardiansyah | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 29 | Kriya Sepaku Nusantara | Nur | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 30 | Jo Noleh | Okananti | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 31 | Cita Rasa Nusantara | Putri Lestari | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 32 | Marcendise Nusantara | Diva | Kriya/ Fashion/ UP2K | Rest Area Nusantara B |
| 33 | Link U | Herry Nurdiansyah | Jasa | Rest Area Nusantara B |

| No | Nama UMKM | Nama Pemilik | Jenis Usaha | Lokasi Usaha |
|----|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 34 | Pos Registrasi / Pijat Sehat Refleksi | M H Andrian | Jasa | Rest Area Nusantara B |
| 35 | Warung Berkah | Wahyu Agus Kurniawan | Makanan & Minuman | HPK 2 |
| 36 | Warung Leni | Leni Marlina | Makanan & Minuman | HPK 2 |
| 37 | Kedai Rezky | Suharli | Makanan & Minuman | HPK 2 |
| 38 | Depo Air Galaxy | Wahyuda Setiawan | Air Minum | HPK 2 |
| 39 | Kantin Ibu Yanti | Yanti Jumar | Makanan & Minuman | HPK 2 |
| 40 | Kantin Borneo | Asti Hermawati | Makanan & Minuman | HPK 2 |
| 41 | Warung KD | Purwati | Sembako | HPK 2 |
| 42 | Kantor Pos | Wendy Nugroho | Layanan pos dan logistik | HPK 2 |
| 43 | Prasmanan Sepaku | Eva Purnamaningsih | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 44 | IPPU Mart | Budi Kurniawan | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 45 | Neng Sri | Budi Kurniawan | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 46 | Kantin Anugerah | Velmi | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 47 | Barbershop | Julio Pradana | Jasa | HPK 1A |
| 48 | Tenda Rasa | Mashadi Ismanto | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 49 | Angkringan Anak Rantau | Letnan Lumban Batu | Makanan & Minuman | HPK 1A |
| 50 | RM Global | Naomi Rante Mallo | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 51 | HPK Laundry | Emildha Hastuty | Jasa | HPK 1B-1 |
| 52 | Prasmanan Nusantara | Sisca Ariyantie | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 53 | Depot Kita | Sunaryo | Air Minum | HPK 1B-1 |

| No | Nama UMKM | Nama Pemilik | Jenis Usaha | Lokasi Usaha |
|----|---|--------------------|-------------------|--------------|
| 54 | Kedai Qita | Sarinah | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 55 | Kizy | Restya Galhiana S | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 56 | IWAPI Mart | Alissa Varliana | Sembako | HPK 1B-1 |
| 57 | Ayam Petok | Nina Pretyana | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 58 | AHM Collection (Oleh-oleh IKN) | Partini | Makanan | HPK 1B-1 |
| 59 | Koperasi TKBM Kesepakatan Masyarakat Sepaku | Edi Suryani | Jasa | HPK 1B-1 |
| 60 | Kedai Julia | Juliana Leonita | Makanan & Minuman | HPK 1B-1 |
| 61 | Nusantara Mart | Mutia | Sembako | HPK 1B-2 |
| 62 | Eeng Wangsa | Reinca Wanga | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 63 | Kedai Shin | Sherlili | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 64 | Dapurku | Nancy Mamesah | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 65 | Kantin Mawar Jaya | Rano Sapran | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 66 | LSG Mie Ayam Bakso Solo | Kasdi | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 67 | Adestrila Kitchen | Agus Tri Santoso | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 68 | Laris Gorengan | Wachid Noor Basuki | Makanan & Minuman | HPK 1B-2 |
| 69 | Warung Nusantara | Rizkiyatul Hasanah | Makanan & Minuman | HPK 1C |

| No | Nama UMKM | Nama Pemilik | Jenis Usaha | Lokasi Usaha |
|----|--------------|---------------|-------------------|--------------|
| 70 | Kantin Titin | Dinda Nuvea | Makanan & Minuman | HPK 1C |
| 71 | Sedap Kantin | Arif Muhtadin | Makanan & Minuman | HPK 1C |

Sumber: otorita IKN, 2025

Bedasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Data ini memuat daftar 71 UMKM yang terdampak proyek infrastruktur IKN per 22 Juli 2025. UMKM tersebut tersebar di beberapa lokasi strategis, terutama di Rest Area Nusantara A dan B serta di HPK (Hunian Penduduk Kawasan) 1A, 1B, 1C, dan HPK 2. Mayoritas UMKM bergerak di bidang makanan dan minuman, seperti warung, kedai, prasmanan, kantin, dan coffee shop. Ada juga UMKM yang bergerak di kriya, fashion, dan UP2K, termasuk usaha kerajinan tangan, pakaian, koperasi, dan merchandise. Sektor jasa juga hadir, misalnya barbershop, laundry, layanan pos, dan pijat refleksi. Beberapa UMKM lain fokus pada sembako dan air minum. Pemilik UMKM terdiri dari perorangan maupun koperasi, dengan beberapa nama yang muncul lebih dari satu kali karena memiliki lebih dari satu usaha. Lokasi seperti Rest Area Nusantara A dan B memiliki konsentrasi UMKM tertinggi, khususnya usaha makanan dan minuman, sementara HPK 1B-1, 1B-2, dan HPK 2 menampung kombinasi UMKM makanan, minuman, jasa, dan sembako. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa proyek infrastruktur IKN berdampak luas pada berbagai jenis UMKM, baik usaha kecil individu maupun koperasi, dan tersebar di titik-titik strategis yang sering dikunjungi masyarakat. Banyak UMKM yang terdampak bergerak di sektor makanan dan minuman, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal di sekitar proyek. Berikutnya untuk memahami UMKM tersebut diperlukan strategi yang tepat sebagai berikut:

1. Keberlanjutan dan Lingkungan

Keberlanjutan dibangun di atas gagasan *triple bottom line*, yakni keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. UMKM yang hanya mengejar profit jangka pendek berisiko kehilangan daya tahan ketika sumber daya alam menipis atau ketika masyarakat menuntut praktik bisnis yang lebih etis. Konsep *green economy* menekankan integrasi prinsip ramah lingkungan dalam proses produksi dan distribusi, mendorong efisiensi energi, pengurangan limbah, dan inovasi teknologi bersih. Dalam konteks pembangunan infrastruktur—yang kerap mengubah tata ruang, menimbulkan polusi, atau memicu alih fungsi lahan—teori ini memberikan kerangka berpikir untuk menilai apakah UMKM dapat tetap menguntungkan sekaligus menjaga daya dukung lingkungan. Keberlanjutan, dengan demikian, bukan sekadar pilihan moral, tetapi strategi bisnis yang menentukan daya saing jangka panjang.

2. Profitabilitas dan Risiko Insolvensi

Dalam literatur keuangan, profitabilitas dipahami sebagai indikator utama keberhasilan usaha, namun dicapai melalui keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (*risk-return trade off*). Bagi UMKM, keterbatasan modal, fluktuasi permintaan, dan ketergantungan pada rantai pasok lokal membuat pengelolaan risiko semakin krusial. Konsep insolvensi, yang mengacu pada ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial, banyak diulas melalui model ekonometrik seperti Altman Z-Score, logit, dan probit. Teori-teori ini menyoroti bahwa kegagalan usaha tidak hanya ditentukan oleh faktor internal—seperti rasio likuiditas atau leverage tetapi juga oleh faktor eksternal, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengubah biaya logistik, pola distribusi, dan kompetisi pasar.

3. Digitalisasi dan Inovasi

Era pembangunan infrastruktur saat ini berjalan beriringan dengan akselerasi digital. Teori difusi inovasi Everett Rogers menjelaskan bahwa adopsi teknologi mengikuti tahap kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi penuh. UMKM yang cepat melalui tahapan ini dapat memanfaatkan teknologi e-commerce, pembayaran nontunai, dan manajemen rantai pasok berbasis data untuk menekan biaya sekaligus memperluas pasar. Ekonomi digital juga memunculkan konsep *network effects*, di mana nilai suatu platform meningkat seiring jumlah penggunaannya. Pemahaman ini penting untuk menjelaskan mengapa UMKM yang memanfaatkan ekosistem digital akan memiliki peluang pertumbuhan eksponensial dibandingkan yang tetap bergantung pada mekanisme konvensional.

UMKM diposisikan sebagai aktor ekonomi yang harus mengoptimalkan profitabilitas, meminimalkan risiko insolvensi, dan menjaga keseimbangan sosial-lingkungan melalui inovasi teknologi. Pembangunan infrastruktur berperan ganda sebagai katalis pertumbuhan sekaligus sumber tekanan. Keberlanjutan UMKM merupakan topik multidimensi yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika ekonomi, sosial, maupun teknologi. Di satu sisi, keberlanjutan mengandung makna kemampuan usaha untuk terus bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, keberlanjutan juga menyangkut aspek manajerial, seperti bagaimana UMKM mampu menjaga profitabilitas, mengelola arus kas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya insolvensi. Pembangunan infrastruktur yang massif semakin menegaskan pentingnya pembahasan ini, karena transformasi fisik yang terjadi pada wilayah akan selalu membawa konsekuensi pada ekosistem usaha kecil dan menengah.

B. Keberlanjutan UMKM

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi salah satu paradigma utama dalam pembahasan pembangunan, bisnis, dan kebijakan publik. Secara etimologis, keberlanjutan berasal dari kata “sustain” yang berarti menopang atau menjaga agar sesuatu tetap berlangsung, dan “ability” yang merujuk pada kemampuan. Dengan demikian, keberlanjutan mencerminkan kemampuan suatu sistem untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa menimbulkan kerusakan pada fondasi yang menopangnya. Keberlanjutan UMKM merupakan gagasan menyeluruh yang menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan agar generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup yang layak. Konsep ini berpijak pada pemikiran bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari ekosistem sosial dan alam yang menopangnya. Beberapa contoh gambar UMKM yang berada di kawasan sekitaran IKN dan rest area yang terdampak infrastruktur yaitu:



Gambar 2.1 UMKM di sekitaran IKN

Bedasarkan gambar diatas memperlihatkan sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Warung dari RM Lodho yang beralamat di jalan Negara yang sudah membuka usaha 10 tahun, pendapatan mereka umumnya bisa naik bisa turun, dan dipengaruhi musim, sejak adanya pembangunan IKN, terlihat sedang berdiri di depan sebuah warung atau tempat usaha yang menjual produk makanan, seperti ayam kampung dan bebek kampung, mengaku omzetnya naik signifikan karena para pekerja pembangunan IKN singgah di warung tersebut hingga saat ini.



Gambar 2.2 UMKM di IKN

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat kios-kios yang dikelola Otoritas IKN bidang Pemberdayaan masyarakat sebanyak 71 UMKM yang berada di rest area KIPP IKN, terkait pendapatan usaha mereka mengaku naik hingga 100% sejak pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara tersebut ujar pemilik Amplang Jo Noleh. UMKM yang berkelanjutan berarti usaha yang mampu bertahan menghadapi guncangan pasar, tumbuh dalam jangka panjang, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi daya dukung lingkungan. Dari sisi ekonomi, keberlanjutan berarti lebih dari sekadar menjaga profitabilitas. Ia menuntut ketahanan finansial, manajemen

risiko yang cermat, serta kemampuan berinovasi agar tetap kompetitif. UMKM perlu memiliki akses pembiayaan yang beragam, sistem akuntansi yang transparan, dan strategi diversifikasi produk maupun pasar. Ketika pembangunan infrastruktur membuka akses transportasi dan logistik baru, UMKM yang berkelanjutan dapat memanfaatkannya untuk memperluas jangkauan distribusi, menekan biaya, dan menciptakan nilai tambah yang berkesinambungan.

Profit yang dihasilkan tidak hanya dipakai untuk pertumbuhan usaha, tetapi juga untuk investasi jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi. Keberlanjutan juga mencakup dimensi sosial yang menekankan peran UMKM sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Usaha kecil yang berkelanjutan memberi kontribusi nyata melalui penciptaan lapangan kerja yang adil, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, dan kemitraan yang setara dengan berbagai pihak. Prinsip inklusivitas mendorong UMKM membuka peluang bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat agar mereka tidak tertinggal dalam arus pembangunan. Dengan mengutamakan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, UMKM membantu menjaga kohesi sosial, memperkuat jaringan komunitas, dan menciptakan rasa memiliki yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi.

Aspek lingkungan tidak kalah penting. UMKM yang berkelanjutan harus menjalankan praktik usaha yang ramah ekosistem, mulai dari pengelolaan limbah, pemilihan bahan baku yang dapat diperbarui, hingga efisiensi energi. Pembangunan infrastruktur sering membawa dampak seperti perubahan tata ruang, peningkatan emisi, atau tekanan pada sumber daya alam. Dalam situasi ini, UMKM dituntut untuk meminimalkan jejak ekologis melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan teknologi bersih. Komitmen ini bukan semata-mata sikap etis, melainkan strategi bisnis: konsumen dan mitra dagang semakin menghargai produk serta proses yang berwawasan lingkungan, sehingga keberlanjutan ekologis menjadi keunggulan kompetitif. Transformasi digital

memperkuat seluruh dimensi keberlanjutan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dari pemasaran daring, sistem pembayaran elektronik, hingga manajemen inventori berbasis data membantu UMKM mengurangi biaya, menghemat waktu, dan memaksimalkan peluang pasar. Digitalisasi juga memungkinkan pengukuran kinerja sosial dan lingkungan secara transparan, misalnya melalui pelaporan emisi atau penggunaan energi yang terdokumentasi. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat menjangkau konsumen lintas wilayah, memperluas pasar ekspor, dan tetap relevan dalam ekonomi yang semakin terhubung.

Pembangunan infrastruktur nasional memberikan peluang dan tantangan yang menuntut adaptasi strategis. Jalan tol, pelabuhan, jaringan energi, dan konektivitas internet menurunkan biaya distribusi dan membuka pasar baru. Namun, peningkatan harga lahan, persaingan dari perusahaan besar, dan pergeseran pola konsumsi bisa menimbulkan tekanan pada usaha kecil. UMKM yang berkelanjutan harus mampu membaca dinamika ini, memanfaatkan infrastruktur sebagai modal pertumbuhan, sekaligus mengantisipasi dampak negatifnya melalui perencanaan bisnis jangka panjang dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keseluruhan gagasan tersebut berpijak pada prinsip *triple bottom line people, planet, profit* yang menekankan keserasian antara kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Keberhasilan UMKM diukur bukan hanya dari besarnya pendapatan, tetapi dari sejauh mana usaha tersebut menyejahterakan karyawan dan komunitas sekitar, menjaga kualitas lingkungan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Integrasi ketiga dimensi ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukanlah tambahan kosmetik, melainkan strategi inti bisnis. Dengan menerapkan konsep keberlanjutan secara menyeluruh, UMKM dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan nasional yang inklusif. Mereka bukan hanya penerima dampak pembangunan infrastruktur, tetapi juga penggerak inovasi, pelindung lingkungan, dan pilar

kesejahteraan sosial. Dalam jangka panjang, UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan akan memiliki ketahanan yang lebih kuat menghadapi krisis, baik akibat disrupsi teknologi, perubahan iklim, maupun fluktuasi ekonomi global, sehingga mampu memberikan kontribusi yang konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Definisi keberlanjutan pertama kali mendapatkan legitimasi global melalui laporan *Our Common Future* yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* atau yang lebih dikenal sebagai *Brundtland Report* (1987). Laporan tersebut mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai:

“Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.”

Definisi ini menekankan adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dengan kapasitas sistem alam, sosial, dan ekonomi untuk mendukung kehidupan di masa depan. Dengan kata lain, keberlanjutan menuntut adanya sinergi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dalam perkembangannya, konsep keberlanjutan semakin diperkaya melalui teori *Triple Bottom Line (TBL)* yang diperkenalkan oleh John Elkington (1997). TBL menegaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada aspek Profit (ekonomi), melainkan juga harus memperhatikan People (sosial) dan Planet (lingkungan). Kerangka ini menjadi pijakan bagi banyak organisasi, termasuk UMKM, dalam menyusun strategi usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan ekologi.

Lebih lanjut, keberlanjutan juga dapat dilihat dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Ekonomi: kemampuan organisasi atau usaha untuk mempertahankan profitabilitas, efisiensi, dan daya saing jangka panjang.

2. Dimensi Sosial: komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja, komunitas lokal, serta kontribusi positif terhadap masyarakat luas.
3. Dimensi Lingkungan: tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya alam, efisiensi energi, serta pengurangan limbah atau emisi.

Pada ranah UMKM, keberlanjutan memiliki makna yang lebih kontekstual. UMKM yang berkelanjutan bukan hanya yang mampu bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi, melainkan juga yang dapat beradaptasi terhadap perubahan struktural seperti pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi digital, dan dinamika pasar global.

Keberlanjutan UMKM dapat ditinjau melalui beberapa indikator penting, antara lain:

1. Kinerja Ekonomi: kemampuan menjaga profitabilitas yang stabil, meningkatkan omzet, dan mengurangi biaya operasional.
2. Ketahanan Finansial: kemampuan mengelola risiko insolvensi, menjaga arus kas positif, dan mempertahankan akses terhadap pembiayaan.
3. Inovasi dan Teknologi: sejauh mana UMKM mampu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi, pemasaran, dan distribusi.
4. Dampak Sosial: peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta memperkuat struktur sosial-ekonomi lokal.
5. Ketangguhan Usaha: daya adaptasi dalam menghadapi guncangan eksternal, baik akibat pembangunan infrastruktur, perubahan kebijakan, maupun krisis global.

Dengan demikian, keberlanjutan UMKM dalam buku ini dipahami sebagai kemampuan UMKM untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang secara konsisten di tengah perubahan lingkungan eksternal yang dipicu oleh pembangunan infrastruktur. Penekanan khusus diberikan pada aspek profitabilitas, risiko insolvensi, dan pemanfaatan

teknologi, karena ketiga hal tersebut merupakan pilar utama bagi keberlangsungan UMKM dalam jangka panjang.

C. Pilar Utama Keberlanjutan

Keberlanjutan tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi ini dikenal sebagai konsep Triple Bottom Line (TBL) yang dikembangkan oleh Elkington (1997). Penerapannya dalam konteks UMKM memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana usaha dapat bertahan jangka panjang sekaligus memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi menekankan pentingnya profitabilitas dan ketahanan finansial bagi keberlanjutan UMKM. Suatu usaha dikatakan berkelanjutan apabila mampu menjaga arus kas positif, memperoleh laba yang stabil, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, dimensi ekonomi mencakup:

- a. Akses terhadap pasar baru yang terbuka akibat adanya jalan tol, transportasi, atau fasilitas logistik.
- b. Kemampuan menjaga profitabilitas di tengah meningkatnya persaingan yang dibawa oleh integrasi ekonomi.
- c. Pengelolaan risiko insolvensi, yakni kemampuan menghindari kegagalan usaha akibat beban biaya tinggi atau penurunan pendapatan.
- d. Efisiensi operasional, termasuk pemanfaatan teknologi untuk menekan biaya dan meningkatkan produktivitas.

Keberlanjutan ekonomi pada UMKM berarti usaha tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki strategi pertumbuhan jangka panjang yang sehat dan adaptif terhadap perubahan eksternal.

2. Dimensi Sosial

Dimensi sosial dalam keberlanjutan menekankan peran usaha dalam mendukung kesejahteraan manusia, baik pekerja, konsumen, maupun komunitas sekitar. UMKM yang berkelanjutan bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan kohesi masyarakat. Aspek sosial dapat dilihat melalui:

- a. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di wilayah terdampak pembangunan infrastruktur.
- b. Peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui pemberian upah layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat.
- c. Keterlibatan komunitas, misalnya dalam bentuk kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar.
- d. Tanggung jawab sosial, seperti menjaga hubungan yang adil dengan konsumen, pemasok, dan stakeholder lainnya.

Dalam jangka panjang, UMKM yang memperhatikan dimensi sosial akan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat, serta loyalitas konsumen dan pekerja yang lebih tinggi.

3. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan berkaitan dengan bagaimana kegiatan usaha memengaruhi ekosistem dan sumber daya alam. Pembangunan infrastruktur sering kali membawa dampak ekologis, dan UMKM di wilayah terdampak juga perlu menyesuaikan diri agar tidak terjebak pada praktik yang merusak lingkungan. Aspek lingkungan yang relevan bagi UMKM meliputi:

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya, seperti energi, air, dan bahan baku.
- b. Pengelolaan limbah dan emisi, termasuk penerapan produksi bersih dan ramah lingkungan.
- c. Penggunaan teknologi hijau, baik dalam produksi, distribusi, maupun kemasan produk.

- d. Konservasi lingkungan lokal, misalnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis usaha (pertanian, perikanan, pariwisata, dll).

Penerapan dimensi lingkungan tidak hanya sebatas kewajiban etis, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai tambah bagi UMKM. Produk ramah lingkungan kini memiliki permintaan yang meningkat, terutama di era konsumen yang semakin sadar akan isu keberlanjutan (*sustainability awareness*). Ketiga dimensi tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. UMKM hanya dapat disebut berkelanjutan apabila mampu menyeimbangkan profitabilitas ekonomi, kontribusi sosial, dan kepedulian lingkungan. Ketidakeimbangan pada salah satu dimensi berpotensi mengancam keberlanjutan usaha itu sendiri. Misalnya:

- a. UMKM yang hanya fokus pada keuntungan ekonomi tetapi mengabaikan aspek sosial bisa kehilangan legitimasi sosial.
- b. UMKM yang hanya memperhatikan aspek sosial tanpa memperhatikan efisiensi ekonomi dapat menghadapi risiko kebangkrutan.
- c. UMKM yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menghadapi masalah hukum, reputasi, atau penolakan konsumen.

Dengan demikian, dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kerangka komprehensif dalam menilai keberlanjutan UMKM terdampak pembangunan infrastruktur.

BAB

3

PRINSIP KEBERLANGSUNGAN UMKM

A. Prinsip Utama Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan UMKM bukan sekadar daftar ukuran kinerja, melainkan cerminan menyeluruh dari kemampuan sebuah usaha kecil untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam jangka panjang. Di tengah percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi digital, prinsip ini menjadi kompas yang membantu pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lain menilai sejauh mana UMKM mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Keberlanjutan yang dimaksud bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang ketahanan menghadapi perubahan struktural, kesiapan teknologi, dan kontribusi nyata bagi komunitas sekitar. Pada sisi ekonomi, keberlanjutan UMKM diukur melalui profitabilitas jangka panjang, pertumbuhan pendapatan yang stabil, efisiensi biaya, serta kemampuan mengelola arus kas secara sehat. Profitabilitas yang konsisten menandakan bahwa usaha memiliki model bisnis yang kokoh, mampu menghadapi fluktuasi permintaan, dan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Tingkat likuiditas dan akses ke pembiayaan formal juga penting karena menunjukkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap prospek UMKM.

Di era pembangunan infrastruktur, prinsip tambahan seperti kemampuan memanfaatkan akses logistik, distribusi yang lebih cepat, dan keterhubungan dengan rantai pasok regional atau nasional menjadi penanda daya saing ekonomi yang semakin relevan. Dari perspektif sosial, prinsip keberlanjutan mencakup kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. UMKM yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyediakan kondisi kerja yang layak, gaji yang adil, dan peluang pengembangan keterampilan. Tingkat partisipasi perempuan, pemuda, serta kelompok marjinal mencerminkan keberpihakan pada kesetaraan dan inklusi. Hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal, partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat menjadi tanda bahwa UMKM berperan sebagai penggerak pembangunan sosial di lingkungannya. Di kawasan yang terdampak pembangunan infrastruktur, prinsip ini juga terlihat dari bagaimana UMKM menjaga kohesi sosial dan mencegah terjadinya marginalisasi kelompok rentan. Dalam dimensi lingkungan, prinsip keberlanjutan meliputi pemakaian energi dan air yang efisien, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan adopsi bahan baku ramah lingkungan. UMKM yang mampu mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan memanfaatkan sumber daya terbarukan menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi. Penerapan prinsip ekonomi sirkular, misalnya melalui daur ulang bahan produksi atau penggunaan kemasan ramah lingkungan, semakin menjadi tolok ukur penting. Sertifikasi lingkungan, seperti ISO 14001 atau standar nasional sejenis, dapat menjadi bukti formal bahwa usaha telah berkomitmen menjaga ekosistem.

Era digital menambahkan dimensi baru berupa prinsip transformasi teknologi. Tingkat pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari pemasaran berbasis media sosial, e-commerce, hingga sistem manajemen berbasis cloud, menandakan kesiapan UMKM menghadapi persaingan global.

Integrasi digital tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan strategis. UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi otomatisasi, analitik data, atau aplikasi keuangan daring akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen dan tuntutan efisiensi.

Di luar aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi, keberlanjutan juga ditentukan oleh prinsip ketahanan dan adaptabilitas. Ketahanan merujuk pada kemampuan menghadapi krisis seperti bencana alam, pandemi, atau guncangan ekonomi, sementara adaptabilitas mencakup kecepatan merespons kebijakan baru, perubahan harga bahan baku, atau pergeseran pola konsumsi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, prinsip ini terlihat dari kesiapan UMKM memanfaatkan peluang pasar baru, seperti meningkatnya arus wisata atau terbukanya akses distribusi, sekaligus mengantisipasi risiko seperti persaingan ketat atau kenaikan harga lahan. Keseluruhan prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan. Profitabilitas tanpa tanggung jawab sosial atau kepedulian lingkungan hanya memberikan pertumbuhan jangka pendek. Demikian pula, kepedulian lingkungan tanpa fondasi ekonomi yang sehat tidak akan menjamin kelangsungan usaha.

Dengan menilai semua dimensi ini secara terpadu, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, serta ketahanan pelaku UMKM dapat merancang strategi yang benar-benar berkelanjutan. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, prinsip ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang mendorong pembangunan inklusif, memastikan bahwa kemajuan infrastruktur membawa manfaat yang adil dan lestari bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menilai apakah UMKM dapat dikategorikan berkelanjutan, diperlukan seperangkat prinsip yang mampu menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh. Prinsip ini umumnya mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta aspek adaptasi teknologi yang kini

menjadi faktor penting dalam era digital dan pembangunan infrastruktur.

1. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi digunakan untuk mengukur daya tahan finansial dan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Beberapa prinsip utama adalah:

- a. Profitabilitas usaha: margin keuntungan bersih, return on assets (ROA), dan return on equity (ROE).
- b. Pertumbuhan omzet/penjualan: konsistensi peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu.
- c. Stabilitas arus kas: kemampuan menjaga arus kas positif untuk operasional jangka pendek.
- d. Efisiensi biaya: rasio biaya produksi, distribusi, dan pemasaran terhadap pendapatan.
- e. Akses pembiayaan: kemudahan memperoleh kredit, modal kerja, atau pembiayaan dari lembaga keuangan.
- f. Risiko insolvensi: prinsip kesehatan keuangan, termasuk debt-to-equity ratio (DER) dan kemampuan membayar utang.

2. Prinsip Sosial

Prinsip sosial menilai sejauh mana UMKM memberikan kontribusi nyata bagi pekerja, komunitas, dan masyarakat luas. Beberapa prinsip yang dapat digunakan meliputi:

- a. Penyerapan tenaga kerja: jumlah pekerja yang direkrut dan tingkat stabilitas kerja.
- b. Kesejahteraan pekerja: pemberian upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang sehat.
- c. Hubungan dengan komunitas lokal: tingkat kemitraan atau keterlibatan dengan masyarakat sekitar.
- d. Kontribusi sosial: partisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, atau pemberdayaan komunitas.
- e. Tingkat kepuasan pelanggan: melalui survei atau loyalitas konsumen yang dapat mencerminkan keberhasilan usaha dalam memenuhi kebutuhan pasar.

3. Prinsip Lingkungan

Prinsip lingkungan berfokus pada praktik ramah lingkungan yang dijalankan UMKM. Meskipun skalanya lebih kecil dibanding perusahaan besar, UMKM tetap diharapkan memperhatikan aspek ini. Prinsip yang relevan antara lain:

- a. Efisiensi penggunaan sumber daya: seperti penghematan air, energi, dan bahan baku.
- b. Pengelolaan limbah: sistem daur ulang, pengurangan sampah, atau penggunaan kemasan ramah lingkungan.
- c. Penggunaan bahan baku berkelanjutan: memanfaatkan sumber daya lokal yang terbarukan.
- d. Dampak terhadap ekosistem: sejauh mana aktivitas usaha tidak merusak lingkungan sekitar.
- e. Penerapan teknologi hijau: adopsi teknologi produksi bersih atau ramah lingkungan.

4. Prinsip Teknologi dan Adaptasi Digital

Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan era digital, keberlanjutan UMKM tidak dapat dilepaskan dari kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Prinsipnya meliputi:

- a. Penggunaan teknologi digital: pemanfaatan aplikasi keuangan, sistem kasir digital, atau *e-commerce*.
- b. Inovasi produk dan proses: sejauh mana UMKM mengembangkan produk baru atau meningkatkan efisiensi produksi.
- c. Pemasaran digital: penggunaan media sosial, marketplace, atau website sebagai saluran distribusi.
- d. Literasi digital pemilik dan karyawan: kemampuan memahami serta memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan usaha.

5. Integrasi Prinsip

Keberlanjutan UMKM hanya dapat dinilai secara komprehensif jika keempat kelompok prinsip di atas dipahami secara bersama-sama. Misalnya:

- a. UMKM yang profitabilitasnya baik tetapi tidak memperhatikan aspek sosial dapat menghadapi resistensi dari masyarakat.
- b. UMKM yang aktif menggunakan teknologi digital tetapi tidak efisien dalam biaya operasional dapat menghadapi risiko insolvensi.
- c. UMKM yang ramah lingkungan tetapi tidak mampu menjaga kestabilan arus kas sulit disebut berkelanjutan secara jangka panjang.

Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan prinsip ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi dalam kerangka IPAT ($\text{Impact} = \text{Population} \times \text{Affluence} \times \text{Technology}$) serta model ekonometrik untuk melihat keberlanjutan UMKM.

B. Aksesibilitas, Distribusi, dan Pasar

Keberlanjutan UMKM sangat erat kaitannya dengan kemudahan mengakses sumber daya, kemampuan mendistribusikan produk, dan kekuatan menembus pasar yang semakin kompetitif. Tiga pilar ini aksesibilitas, distribusi, dan pasar bukan sekadar tahapan teknis dalam rantai bisnis, melainkan jantung dari daya saing yang menentukan apakah UMKM mampu bertahan dan tumbuh di tengah arus pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.

Aksesibilitas mencakup kemampuan UMKM menjangkau berbagai prasyarat usaha: bahan baku, modal, teknologi, informasi, hingga sarana transportasi dan energi. Pembangunan jalan tol, jaringan rel, pelabuhan, serta perluasan internet berkecepatan tinggi membawa dampak langsung pada kemudahan tersebut. UMKM yang sebelumnya terisolasi secara geografis kini dapat mengakses pasar input yang lebih besar dengan biaya lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih singkat. Kemudahan memperoleh pembiayaan formal baik dari perbankan, lembaga keuangan mikro, maupun platform fintech juga menjadi faktor kunci. Akses permodalan yang inklusif memungkinkan UMKM melakukan ekspansi, memperbarui

peralatan, atau mengadopsi teknologi baru tanpa terbebani biaya pinjaman yang memberatkan.

Di era digital, aksesibilitas informasi pasar dan tren konsumen melalui data daring serta media sosial menjadi nilai tambah yang menentukan kecepatan pengambilan keputusan. Distribusi adalah jembatan vital antara produksi dan konsumen. Infrastruktur fisik yang memadai mempercepat aliran barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan menjaga kualitas produk hingga ke titik penjualan. Jalan tol yang menghubungkan sentra produksi ke pusat kota, layanan kargo udara yang lebih terjadwal, dan gudang logistik modern memberikan keuntungan strategis bagi UMKM yang ingin memperluas jangkauan. Pada saat yang sama, teknologi digital melahirkan sistem distribusi baru yang memadukan layanan pengiriman berbasis aplikasi, platform e-commerce, dan manajemen inventori berbasis cloud.

UMKM yang mampu menggabungkan jaringan distribusi fisik dan digital akan lebih lincah menyesuaikan pasokan dengan permintaan, mengurangi risiko keterlambatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di daerah yang sedang berkembang, kolaborasi antarpelaku usaha dalam membangun pusat distribusi bersama atau layanan transportasi kolektif juga menjadi praktik inovatif yang menekan biaya. Pasar menjadi tujuan akhir sekaligus medan persaingan yang menguji ketangguhan UMKM. Infrastruktur yang semakin baik memperluas cakupan pasar, bukan hanya ke kota-kota besar, tetapi juga ke wilayah pedesaan dan bahkan ke ranah internasional. Peningkatan akses transportasi dan konektivitas digital memungkinkan produk lokal menembus rantai pasok global. Namun, akses pasar yang lebih luas juga berarti persaingan yang lebih tajam. UMKM dituntut untuk terus berinovasi dalam desain produk, menjaga konsistensi kualitas, dan memanfaatkan data konsumen untuk menyesuaikan penawaran. Kehadiran e-commerce dan media sosial memungkinkan promosi yang lebih efektif dan murah, sekaligus memberikan peluang untuk melakukan segmentasi yang lebih

akurat. Di sisi lain, kemampuan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, melalui layanan purna jual atau komunitas daring, menjadi keunggulan yang tak mudah ditiru.

Ketiga elemen ini saling menguatkan dan membentuk ekosistem yang menentukan keberlanjutan usaha. Aksesibilitas yang baik akan memperlancar distribusi; distribusi yang efisien akan memperluas pangsa pasar; dan pasar yang berkembang akan mendorong kebutuhan peningkatan akses modal serta teknologi. Di wilayah yang sedang gencar membangun infrastruktur, sinergi ketiga faktor ini menjadi semakin nyata: jalan baru mempercepat distribusi, jaringan internet memperluas promosi, sementara kebijakan pembiayaan inklusif membuka akses permodalan. Namun keberhasilan memanfaatkan peluang ini tidak terjadi otomatis. Diperlukan kapasitas manajerial, literasi digital, dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari pelaku UMKM untuk mengantisipasi risiko seperti kenaikan biaya sewa lahan, perubahan pola permintaan, atau persaingan dari perusahaan besar.

Dalam kerangka keberlanjutan, aksesibilitas, distribusi, dan pasar tidak hanya dipandang sebagai proses bisnis, tetapi sebagai prinsip ketangguhan jangka panjang. UMKM yang mampu mengintegrasikan ketiganya secara strategis akan memiliki daya tahan lebih baik terhadap guncangan eksternal, mulai dari fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan kebijakan perdagangan. Lebih jauh, kekuatan pada tiga aspek ini memungkinkan UMKM menjadi motor penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan inklusif di tengah percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Di era ekonomi digital, platform digital telah menjadi tulang punggung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Dengan memanfaatkan tiga jenis platform utama marketplace, fintech, dan ERP mikro pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan bertransformasi secara profesional meskipun dengan sumber daya terbatas, Menurut Sudiyono, dkk (2018)

mendefinisi dari lima alat promosi utama yaitu campuran khusus periklanan, public relations, personal selling, promosi penjualan, dan direct marketing tools yang menggunakan perusahaan untuk mempersuasi mengkomunikasikan nilai pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan.

1. Iklan Setiap dibayar bentuk persentation nonpersonal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor identifiield.
2. Promosi penjualan Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa
3. Personal selling presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan membuat penjualan dan bulding hubungan pelanggan

Hubungan masyarakat membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, membangun baik "citra perusahaan" dan halding atau berangkat rumor yang tidak menguntungkan, cerita, dan peristiwa. Pemasaran langsung Koneksi langsung dengan konsumen individu hati-hati ditargetkan untuk kedua mendapatkan tanggapan langsung dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng.

Keberlanjutan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal usaha dalam menjaga profitabilitas dan ketahanan finansial, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama aksesibilitas, distribusi, dan pasar. Ketiga aspek ini memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilaksanakan pemerintah, karena infrastruktur berperan sebagai penghubung antara produsen, konsumen, serta rantai pasok.

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan UMKM dalam menjangkau sumber daya, sarana produksi, dan pasar. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital (internet) memberikan dampak signifikan terhadap tingkat aksesibilitas UMKM.

- a. Akses bahan baku: semakin mudah dan murah diperoleh karena infrastruktur transportasi memperpendek jarak dan waktu tempuh.
- b. Akses pasar: UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada wilayah lokal.
- c. Akses pembiayaan dan informasi: melalui digitalisasi, UMKM memperoleh peluang lebih besar untuk mengakses permodalan, pelatihan, dan jaringan usaha.

Aksesibilitas yang baik menjadi prasyarat bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

2. Distribusi

Distribusi adalah aspek penting dalam keberlanjutan UMKM karena menyangkut saluran penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik dapat meningkatkan efisiensi distribusi dengan cara:

- a. Menurunkan biaya distribusi: ongkos kirim menjadi lebih murah karena waktu tempuh lebih singkat.
- b. Meningkatkan kualitas layanan: produk dapat sampai lebih cepat dan dalam kondisi lebih baik.
- c. Memperluas jaringan distribusi: memungkinkan UMKM untuk masuk ke rantai pasok nasional maupun global.

Di era digital, distribusi juga semakin terhubung dengan platform *e-commerce* dan layanan logistik berbasis teknologi, yang memungkinkan UMKM menjangkau konsumen lintas daerah.

3. Pasar

Pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan produksi UMKM. Pembangunan infrastruktur berperan ganda dalam menciptakan pasar:

- a. Pasar lokal berkembang: daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi terbuka, menciptakan peluang baru bagi UMKM untuk menjual produk ke masyarakat setempat maupun wisatawan.

- b. Pasar regional dan nasional: integrasi transportasi membuka peluang bagi UMKM untuk menembus pasar antar kota atau provinsi.
- c. Pasar digital/global: dengan adanya internet berkecepatan tinggi, UMKM tidak hanya mengandalkan pasar konvensional, tetapi juga dapat memasarkan produknya melalui marketplace nasional dan internasional.

Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk ekosistem yang menentukan keberlanjutan UMKM. Infrastruktur yang baik meningkatkan aksesibilitas, yang pada gilirannya memperbaiki distribusi produk, dan akhirnya memperluas pasar. Namun, di sisi lain, peningkatan akses dan pasar juga dapat memunculkan tantangan berupa persaingan yang lebih ketat dengan pelaku usaha besar atau produk impor.

Dengan demikian, dalam konteks keberlanjutan UMKM, aksesibilitas, distribusi, dan pasar menjadi prinsip penting yang harus dibahas secara komprehensif. Hanya dengan mengoptimalkan ketiga faktor ini, UMKM dapat menjaga profitabilitas, memperkuat daya saing, dan mengurangi risiko insolvensi di tengah derasnya perubahan akibat pembangunan infrastruktur.

C. Perubahan Pola Usaha

Percepatan pembangunan infrastruktur dan penetrasi teknologi digital telah mengubah lanskap usaha secara mendasar, mendorong UMKM untuk menyesuaikan pola bisnis dan menghadapi bentuk kompetisi yang semakin kompleks. Jika sebelumnya banyak UMKM bergantung pada pasar lokal dengan pola produksi tradisional, kini mereka dihadapkan pada tuntutan efisiensi, inovasi, dan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Perubahan pola usaha ini tidak hanya dipicu oleh kehadiran infrastruktur fisik seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik yang semakin terhubung, tetapi juga oleh kemajuan teknologi informasi yang melahirkan cara baru dalam bertransaksi dan berinteraksi dengan konsumen.

Dari sisi pola usaha, transformasi terlihat pada pergeseran dari model bisnis berbasis tatap muka menjadi kombinasi luring dan daring. UMKM mulai memanfaatkan e-commerce, media sosial, dan platform pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Proses produksi juga mengalami modernisasi melalui adopsi teknologi otomatisasi, sistem manajemen inventori berbasis cloud, dan penggunaan analisis data untuk memprediksi permintaan pasar. Di sektor jasa, pola kerja fleksibel dan kemitraan berbasis proyek semakin umum, memungkinkan pelaku usaha menyesuaikan kapasitas dengan fluktuasi permintaan. Pola usaha yang sebelumnya terfragmentasi kini cenderung membentuk rantai pasok yang lebih terintegrasi, di mana UMKM menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang lebih besar dan saling bergantung. Perubahan pola ini turut menggeser peta kompetisi. Pembangunan infrastruktur membuka akses yang sama bagi berbagai pelaku, sehingga batas geografis yang dulu melindungi pasar lokal semakin kabur. UMKM kini harus bersaing tidak hanya dengan sesama pelaku usaha di wilayah terdekat, tetapi juga dengan perusahaan dari kota lain, bahkan dari luar negeri, yang memanfaatkan konektivitas logistik dan pemasaran digital. Persaingan harga menjadi semakin tajam karena konsumen dapat membandingkan produk dengan mudah melalui platform daring.

Di sisi lain, kualitas layanan, kecepatan pengiriman, dan inovasi produk menjadi faktor pembeda yang semakin menentukan loyalitas pelanggan. Kompetisi juga semakin bersifat multidimensional. Tidak hanya terjadi antar-UMKM, tetapi juga dengan perusahaan besar yang masuk ke pasar ritel dan digital, serta dengan produsen yang mengadopsi teknologi mutakhir untuk menekan biaya. Kondisi ini menuntut UMKM untuk membangun keunggulan kompetitif yang tidak sekadar berbasis harga, tetapi juga pada diferensiasi produk, nilai budaya lokal, dan pengalaman pelanggan. Strategi kolaborasi, seperti membentuk koperasi digital, jaringan kemitraan produksi, atau pusat distribusi bersama, muncul sebagai cara

untuk meningkatkan daya tawar dan mengurangi risiko persaingan yang tidak seimbang.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen turut mempengaruhi dinamika kompetisi. Konsumen modern menuntut produk yang lebih personal, ramah lingkungan, dan disertai layanan purna jual yang baik. Mereka juga lebih sensitif terhadap kecepatan dan kenyamanan transaksi. UMKM yang gagal merespons perubahan ini berisiko kehilangan pasar meskipun memiliki produk berkualitas. Sebaliknya, pelaku yang cepat beradaptasi dengan preferensi baru akan mampu mempertahankan pangsa pasar meski kompetisi semakin ketat.

Perubahan pola usaha dan kompetisi ini menuntut kemampuan adaptasi strategis. UMKM perlu meningkatkan literasi digital, mengelola keuangan dengan lebih cermat, dan membangun kapasitas inovasi produk maupun layanan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lain memiliki peran penting dalam menyediakan pelatihan, pendampingan teknologi, dan kebijakan yang mendorong ekosistem usaha yang adil. Hanya dengan kesiapan seperti inilah UMKM dapat bertahan, tumbuh, dan menjadi bagian penting dari perekonomian nasional di era pembangunan infrastruktur dan revolusi digital.

Pembangunan infrastruktur nasional tidak hanya menghadirkan kemudahan akses, efisiensi distribusi, dan perluasan pasar, tetapi juga membawa konsekuensi berupa perubahan pola usaha serta dinamika kompetisi yang semakin kompleks. UMKM sebagai entitas ekonomi yang relatif rentan dituntut untuk beradaptasi secara cepat agar tetap relevan dan berkelanjutan di tengah arus transformasi yang terjadi.

1. Perubahan Pola Usaha

Infrastruktur modern menciptakan kondisi yang mendorong UMKM untuk mengubah cara mereka beroperasi. Perubahan pola usaha dapat diamati dalam beberapa aspek:

- a. Digitalisasi proses bisnis: UMKM mulai mengadopsi *e-commerce*, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital sebagai saluran utama dalam menjual produk dan berinteraksi dengan konsumen.
- b. Diversifikasi produk dan layanan: untuk menghadapi pasar yang lebih luas dan beragam, UMKM terdorong menciptakan variasi produk sesuai tren, standar kualitas, dan selera konsumen.
- c. Orientasi pada efisiensi: ketersediaan infrastruktur transportasi dan logistik membuat UMKM lebih fokus pada pengendalian biaya produksi dan distribusi guna meningkatkan margin keuntungan.
- d. Kolaborasi dan kemitraan: perubahan pola usaha juga ditandai dengan meningkatnya kerjasama antar UMKM, maupun antara UMKM dengan perusahaan besar, koperasi, dan pemerintah, untuk memperkuat daya saing kolektif.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur tidak hanya memperbesar peluang, tetapi juga mengubah cara UMKM memandang dan menjalankan usaha, dari yang bersifat tradisional ke arah yang lebih modern dan terintegrasi.

2. Dinamika Kompetisi

Peluang yang terbuka melalui pembangunan infrastruktur juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya intensitas kompetisi. Hal ini terjadi pada beberapa level:

- a. Kompetisi lokal: UMKM harus bersaing dengan usaha sejenis di wilayah yang sama, terutama setelah aksesibilitas meningkat sehingga produk dari luar daerah lebih mudah masuk.
- b. Kompetisi nasional: integrasi pasar melalui jalur transportasi dan platform digital mempertemukan UMKM dengan pesaing dari berbagai daerah di Indonesia.

- c. Kompetisi global: dengan berkembangnya perdagangan lintas batas melalui internet, UMKM kini juga menghadapi produk impor yang memiliki kualitas, harga, dan daya saing tinggi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendorong masuknya investor besar dan perusahaan skala menengah hingga besar ke wilayah yang sebelumnya didominasi UMKM. Kondisi ini dapat menciptakan asimetris kompetisi, di mana UMKM harus bersaing dengan pemain yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan distribusi lebih kuat.

3. Implikasi terhadap Keberlanjutan UMKM

Perubahan pola usaha dan kompetisi ini memiliki implikasi ganda:

- a. Positif: membuka peluang pengembangan usaha, memperluas jaringan pasar, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi.
- b. Negatif: menimbulkan risiko marginalisasi bagi UMKM yang tidak mampu beradaptasi, memperbesar ancaman insolvensi akibat tekanan harga, serta meningkatkan ketergantungan pada pasar digital yang penuh persaingan.

Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan adaptif mereka dalam merespons perubahan pola usaha dan dinamika kompetisi. UMKM yang proaktif dalam mengadopsi teknologi, mengelola sumber daya, serta membangun strategi diferensiasi akan lebih mampu bertahan dan tumbuh di tengah perubahan struktur pasar.

BAB

4

PROFITABILITAS KEBERLANJUTAN UMKM

A. Ukuran Profitabilitas

Profitabilitas merupakan inti dari keberlangsungan usaha karena menunjukkan kemampuan sebuah bisnis menghasilkan laba secara konsisten dan berkesinambungan. Bagi UMKM, profitabilitas tidak hanya menjadi tolok ukur kinerja keuangan, tetapi juga prinsip kesehatan usaha, ketahanan menghadapi risiko, serta daya saing jangka panjang. Keberhasilan mempertahankan profitabilitas berarti bahwa sebuah UMKM mampu menutup seluruh biaya produksi dan operasional, sekaligus menyisakan surplus yang dapat diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan, inovasi, atau ekspansi pasar. Secara konseptual, profitabilitas menegaskan seberapa efektif pelaku usaha memanfaatkan sumber daya yang terbatas seperti modal, tenaga kerja, dan aset fisik—untuk menghasilkan pendapatan yang melebihi seluruh pengeluaran. Ini mencerminkan efisiensi manajerial, keakuratan strategi harga, pengendalian biaya, serta kemampuan membaca dinamika pasar. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan transformasi digital, profitabilitas menjadi bukti adaptasi: UMKM yang mampu meraih laba stabil berarti berhasil mengoptimalkan peluang infrastruktur baru, seperti akses logistik dan distribusi yang lebih lancar, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar dan menekan biaya.

Profitabilitas juga mencerminkan daya saing. Laba hanya dapat diperoleh bila produk atau layanan memiliki nilai yang diakui konsumen, baik dari segi kualitas, keunikan, maupun pengalaman yang diberikan. Ketika infrastruktur baru membuka akses bagi pelaku usaha besar maupun pemain global, UMKM dituntut memiliki proposisi nilai yang membedakan agar tetap unggul. Dengan kata lain, profitabilitas adalah cermin kekuatan model bisnis dan kemampuan menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru kompetitor.

Untuk menilai profitabilitas secara akurat, berbagai ukuran dan rasio keuangan digunakan, masing-masing memberikan perspektif berbeda terhadap kinerja usaha:

1. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin) menunjukkan persentase laba bersih terhadap total penjualan setelah dikurangi semua biaya, termasuk pajak dan bunga. Rasio ini mengungkap seberapa efisien UMKM mengendalikan biaya dan mempertahankan strategi harga yang sehat. Margin tinggi menandakan kombinasi efisiensi dan daya tarik produk yang kuat.
2. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin) mengukur selisih antara pendapatan dan biaya pokok penjualan, menyoroti efisiensi proses produksi atau pengadaan barang. Rasio ini penting untuk menilai kekuatan pengendalian biaya bahan baku dan produktivitas tenaga kerja.
3. Return on Assets (ROA) menilai sejauh mana aset yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan laba. Bagi UMKM yang sering bekerja dengan aset terbatas, ROA menjadi prinsip penting untuk memastikan setiap unit aset memberikan hasil optimal.
4. Return on Equity (ROE) mengukur pengembalian yang diperoleh pemilik usaha atas modal sendiri. Rasio ini penting bagi investor dan pemilik modal karena menunjukkan apakah imbal hasil sepadan dengan risiko yang diambil.
5. Rasio Laba terhadap Biaya Operasional (Operating Profit Ratio) memberikan gambaran tentang efisiensi operasional sehari-hari, menilai kemampuan bisnis menghasilkan laba

dari aktivitas utama tanpa memasukkan pendapatan atau biaya non-operasional.

Selain rasio keuangan, arus kas operasi yang positif dan konsisten menjadi pelengkap penting dalam mengukur profitabilitas. Arus kas yang sehat menegaskan bahwa laba yang tercatat benar-benar dapat diubah menjadi likuiditas untuk membayar utang, membiayai ekspansi, atau menghadapi keadaan darurat. Hal ini sangat penting bagi UMKM yang sering menghadapi keterbatasan modal kerja. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, profitabilitas UMKM juga dipengaruhi faktor eksternal seperti fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya transportasi, serta persaingan yang meningkat akibat terbukanya akses pasar.

Di sisi lain, infrastruktur yang lebih baik—jalan raya, pelabuhan, akses internet dapat menurunkan biaya distribusi, mempercepat perputaran stok, dan memperluas pangsa pasar, yang semuanya mendukung peningkatan laba. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem manajemen inventori berbasis cloud, pemasaran daring, dan analitik data dapat semakin memperkuat efisiensi biaya dan penetapan harga yang tepat.

Pada akhirnya, profitabilitas bukan sekadar angka, tetapi representasi dari kemampuan UMKM untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis, membangun keunggulan kompetitif, dan menjaga keberlanjutan keuangan. Bagi pelaku UMKM, pemantauan berkelanjutan atas berbagai rasio profitabilitas dan arus kas menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis mulai dari ekspansi pasar, investasi teknologi, hingga pengelolaan risiko. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, prinsip ini menjadi alat diagnosis yang menunjukkan kesehatan sektor UMKM, memberikan dasar untuk kebijakan dukungan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami konsep dan ukuran profitabilitas secara menyeluruh, UMKM dapat menavigasi tantangan pembangunan infrastruktur dan persaingan global sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Profitabilitas merupakan jantung dari keberlangsungan sebuah usaha. Dalam konteks ekonomi mikro, profitabilitas tidak hanya sekadar mencerminkan berapa besar laba yang diperoleh, melainkan juga bagaimana laba tersebut dihasilkan dan apakah dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, profitabilitas bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi menjadi prinsip vital yang mencerminkan kesehatan, daya tahan, serta prospek jangka panjang UMKM.

Secara konseptual, profitabilitas dapat dipahami dari beberapa sudut pandang:

1. Sebagai tolok ukur keberhasilan manajerial: sejauh mana UMKM mampu mengelola sumber daya terbatas untuk menghasilkan output bernilai tambah.
2. Sebagai prinsip daya saing: menunjukkan kemampuan UMKM bertahan dalam pasar yang semakin terbuka, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.
3. Sebagai fondasi keberlanjutan: laba yang diperoleh bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk reinvestasi, inovasi produk, dan peningkatan kapasitas usaha.
4. Sebagai simbol legitimasi sosial-ekonomi: UMKM yang profitabel lebih mudah dipercaya oleh konsumen, lembaga keuangan, maupun mitra bisnis, sehingga mendapatkan akses lebih luas terhadap modal, pasar, dan peluang kolaborasi.

Dengan demikian, profitabilitas dalam konteks UMKM tidak bisa dipandang semata dari sisi akuntansi, tetapi juga memiliki makna strategis sebagai modal sosial-ekonomi yang menopang keberlanjutan usaha.

Ukuran profitabilitas lebih dari sekadar rasio. Secara teknis, profitabilitas memang sering diukur melalui rasio keuangan seperti Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE). Namun, bagi UMKM, angka-angka tersebut harus dipahami lebih luas:

1. Gross Profit Margin (GPM): bukan sekadar efisiensi biaya, tetapi mencerminkan kemampuan UMKM mengendalikan harga pokok produksi sambil tetap menjaga kualitas produk.
2. Net Profit Margin (NPM): menggambarkan keseimbangan antara efisiensi internal dengan strategi menghadapi tekanan eksternal, seperti kenaikan bahan baku atau persaingan harga.
3. Return on Assets (ROA): menilai sejauh mana UMKM mampu mengoptimalkan aset yang sering kali terbatas – baik berupa peralatan sederhana maupun tenaga kerja keluarga.
4. Return on Equity (ROE): bukan hanya keuntungan pemilik, tetapi juga ukuran keadilan dan keberlanjutan, karena berkaitan dengan kepuasan pemilik modal sekaligus kesinambungan investasi.
5. Break Even Point (BEP): meskipun sederhana, BEP bagi UMKM sering menjadi batas hidup-mati usaha; titik di mana mereka memastikan tidak merugi meski berada di tengah ketidakpastian pasar.

Dalam kerangka keberlanjutan, ukuran-ukuran profitabilitas ini sebaiknya dipadukan dengan prinsip non-keuangan, seperti tingkat kepuasan pelanggan, loyalitas konsumen, dan kemampuan berinovasi. Hal ini penting karena profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi UMKM. Di satu sisi, infrastruktur meningkatkan akses pasar, distribusi, dan efisiensi operasional, sehingga membuka ruang untuk profitabilitas yang lebih tinggi. Namun, di sisi lain, infrastruktur juga menghadirkan pesaing baru, menuntut standar kualitas lebih tinggi, serta menekan harga pasar.

Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks ini harus dipahami sebagai cermin kemampuan adaptasi UMKM. Profit yang stabil atau meningkat menunjukkan bahwa UMKM mampu memanfaatkan peluang yang dibawa pembangunan

infrastruktur. Sebaliknya, profit yang menurun dapat menjadi tanda kerentanan dan potensi menuju insolvensi.

Bagi UMKM, profitabilitas yang berkelanjutan tidak hanya berarti bertahan hidup, tetapi juga:

1. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, dengan melakukan ekspansi usaha, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi ekonomi lokal.
2. Daya tahan terhadap krisis, karena laba yang konsisten memungkinkan adanya cadangan dana untuk menghadapi ketidakpastian.
3. Peran sosial yang lebih besar, misalnya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dengan kata lain, profitabilitas bagi UMKM bukan hanya ukuran “seberapa besar mereka mendapatkan keuntungan”, melainkan juga “seberapa kuat mereka mampu bertahan, beradaptasi, dan memberikan manfaat” bagi ekosistem ekonomi yang lebih luas.

B. Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Profitabilitas UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan penjualan, tetapi juga oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Memahami faktor-faktor ini penting agar pelaku usaha dapat mengelola sumber daya secara efisien, meminimalkan risiko, dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan bisnis—terutama di tengah pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.

1. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada aspek yang dapat dikendalikan secara langsung oleh pelaku usaha.

- a. Manajemen Keuangan: Pengelolaan arus kas, pengendalian biaya, dan keputusan investasi memegang peranan besar. UMKM dengan pencatatan keuangan yang

- rapi dan analisis biaya yang baik dapat mengurangi pemborosan serta memaksimalkan margin laba.
- b. Harga dan Strategi Penjualan: Penetapan harga yang sesuai dengan daya beli pasar, sekaligus mempertahankan nilai produk, menjadi kunci menjaga margin keuntungan. Strategi diskon atau bundling produk juga dapat memengaruhi volume penjualan dan profitabilitas.
 - c. Efisiensi Produksi: Penggunaan teknologi, otomatisasi, dan manajemen rantai pasok yang efisien membantu menekan biaya produksi. Pemeliharaan peralatan dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan produktivitas juga berdampak langsung pada laba.
 - d. Inovasi Produk dan Layanan: Produk yang unik dan relevan dengan tren konsumen memberikan keunggulan kompetitif dan memungkinkan penetapan harga yang lebih baik, sehingga meningkatkan profitabilitas.
 - e. Kualitas Sumber Daya Manusia: Keterampilan, pengalaman, dan motivasi tenaga kerja memengaruhi efisiensi, kreativitas, dan layanan pelanggan, yang semuanya berdampak pada pendapatan dan biaya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berada di luar kendali langsung UMKM, tetapi tetap memengaruhi profitabilitas.

- a. Kondisi Ekonomi Makro: Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga menentukan daya beli konsumen dan biaya pinjaman. Saat inflasi tinggi, biaya bahan baku dan logistik naik, yang dapat menekan margin.
- b. Persaingan Pasar: Peningkatan jumlah pesaing, termasuk perusahaan besar atau pemain global yang memanfaatkan infrastruktur baru, dapat menekan harga dan memaksa UMKM meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya.
- c. Perubahan Teknologi: Digitalisasi memberi peluang efisiensi dan perluasan pasar, tetapi juga menuntut investasi baru. UMKM yang lambat mengadopsi

teknologi berisiko tertinggal dan kehilangan pangsa pasar.

- d. Kebijakan Pemerintah: Regulasi pajak, upah minimum, dan kebijakan perdagangan memengaruhi struktur biaya dan peluang pasar. Dukungan berupa subsidi, pelatihan, atau insentif digitalisasi dapat meningkatkan profitabilitas.
- e. Akses Infrastruktur: Ketersediaan jalan tol, pelabuhan, internet berkecepatan tinggi, dan fasilitas logistik menurunkan biaya distribusi dan memperluas jangkauan pasar, sehingga berpotensi meningkatkan laba.

C. Dinamika Pasar

Perubahan selera konsumen, tren gaya hidup, dan kesadaran lingkungan memengaruhi permintaan. UMKM yang cepat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran akan lebih mampu mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas. Kepekaan terhadap data dan analisis perilaku konsumen, termasuk melalui media sosial dan platform e-commerce, menjadi keunggulan tersendiri.

1. Risiko dan Ketahanan Usaha

Krisis ekonomi, bencana alam, atau gangguan rantai pasok dapat menurunkan profitabilitas secara drastis. Ketahanan UMKM—kemampuan membangun cadangan kas, diversifikasi pemasok, dan memiliki rencana darurat—menjadi faktor pembeda dalam mempertahankan laba ketika kondisi eksternal memburuk.

2. Akses Pembiayaan dan Modal Kerja

Ketersediaan modal kerja yang memadai memungkinkan UMKM membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk memperoleh diskon, menutup biaya operasional, atau melakukan ekspansi. Keterbatasan akses kredit dapat menunda produksi, mengurangi skala usaha, dan menekan profitabilitas.

Secara keseluruhan, profitabilitas UMKM merupakan hasil interaksi antara keputusan internal yang cermat dan kemampuan menavigasi lingkungan eksternal yang dinamis. Pembangunan infrastruktur memberi peluang besar untuk menurunkan biaya distribusi dan memperluas pasar, tetapi juga menghadirkan persaingan baru. Pelaku UMKM yang mampu mengelola keuangan secara disiplin, berinovasi, mengadopsi teknologi, dan membangun ketahanan terhadap risiko akan lebih mampu mempertahankan tingkat profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan. Profitabilitas UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) perusahaan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting karena dapat membantu pelaku UMKM mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi ancaman serta memanfaatkan peluang.

1. Faktor Internal

Faktor internal berkaitan langsung dengan kemampuan manajerial, strategi, dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam UMKM. Beberapa faktor utama meliputi:

a. Manajemen biaya dan efisiensi operasional

Kemampuan UMKM dalam mengendalikan biaya produksi, distribusi, serta biaya operasional sangat menentukan tingkat laba. Efisiensi yang baik dapat meningkatkan margin keuntungan meskipun harga jual produk relatif stabil.

b. Struktur modal dan pembiayaan

Modal kerja yang memadai memungkinkan UMKM untuk melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah besar (ekonomi skala), memperbaiki peralatan, atau melakukan ekspansi pasar. Sebaliknya, struktur modal yang tidak sehat dapat menimbulkan beban bunga yang tinggi dan menekan profitabilitas.

c. Inovasi produk dan kualitas layanan

UMKM yang mampu berinovasi dalam desain, teknologi, maupun model bisnis akan lebih mudah menarik konsumen baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kualitas layanan juga berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen dan stabilitas pendapatan.

d. Kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Keterampilan, pengetahuan, dan motivasi tenaga kerja menjadi aset penting. SDM yang produktif dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus mendorong kreativitas usaha.

e. Strategi pemasaran

Profitabilitas sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemasaran, baik melalui saluran konvensional maupun digital. Pemanfaatan media sosial, *marketplace*, dan strategi branding yang tepat dapat memperluas jangkauan pasar.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, profitabilitas UMKM juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang seringkali berada di luar kendali langsung pelaku usaha.

a. Infrastruktur dan aksesibilitas

Pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital secara langsung memengaruhi biaya distribusi, kecepatan logistik, dan peluang akses pasar. Infrastruktur yang memadai umumnya meningkatkan potensi profitabilitas.

b. Kondisi pasar dan tingkat persaingan

Tingginya intensitas kompetisi dapat menekan harga jual dan margin laba. Sebaliknya, pasar yang berkembang pesat memberi peluang peningkatan penjualan dan profitabilitas.

c. Kebijakan pemerintah dan regulasi

Subsidi, keringanan pajak, insentif usaha, dan dukungan pembiayaan dapat mendorong profitabilitas UMKM. Namun, regulasi yang memberatkan justru dapat mengurangi margin keuntungan.

3. Faktor makroekonomi

Inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat memengaruhi daya beli masyarakat, biaya produksi, serta tingkat permintaan terhadap produk UMKM.

a. Perubahan teknologi dan digitalisasi

Adopsi teknologi baru membuka peluang efisiensi dan ekspansi pasar, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan bagi UMKM yang kurang siap bertransformasi.

b. Faktor Sosial dan Lingkungan

Dalam konteks keberlanjutan, profitabilitas UMKM juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan, antara lain:

- 1) Kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan yang dapat menciptakan permintaan baru bagi UMKM yang berorientasi pada keberlanjutan.
- 2) Keterikatan sosial dengan komunitas lokal, misalnya melalui pemberdayaan tenaga kerja sekitar, yang dapat meningkatkan citra usaha sekaligus loyalitas konsumen.
- 3) Dampak lingkungan pembangunan infrastruktur, seperti perubahan tata ruang atau pergeseran lokasi pasar, yang bisa memengaruhi kelangsungan usaha.

4. Sinergi Faktor Internal dan Eksternal

Profitabilitas UMKM tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Misalnya, infrastruktur baru membuka akses pasar (faktor eksternal), tetapi hanya UMKM dengan strategi pemasaran efektif dan manajemen biaya efisien (faktor internal) yang mampu benar-benar meningkatkan profitabilitas.

Insolvensi UMKM

Kebangkrutan dalam literatur keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, baik berupa pembayaran utang jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kelangsungan operasional usaha terancam. Dalam konteks UMKM, kebangkrutan seringkali muncul akibat keterbatasan modal, lemahnya manajemen keuangan, dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Insolvensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada kondisi ketika sebuah usaha tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya—baik jangka pendek maupun jangka panjang—karena arus kas yang negatif, laba yang menurun, atau tingginya beban utang. Dalam praktiknya, insolvensi bukan sekadar tanda kegagalan keuangan, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen, rentannya model bisnis, dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Secara hukum, insolvensi biasanya dipahami sebagai ketidakmampuan membayar utang ketika jatuh tempo atau ketika total kewajiban melebihi total aset. Bagi UMKM, kondisi ini dapat berarti macetnya pembayaran kepada pemasok, keterlambatan gaji karyawan, hingga ancaman kebangkrutan yang berujung pada likuidasi aset. Dampaknya meluas: bukan hanya bagi pemilik dan pekerja, tetapi juga bagi rantai pasok lokal, konsumen, dan perekonomian daerah yang bergantung pada aktivitas UMKM sebagai penggerak utama.

Insolvensi UMKM umumnya muncul dari kombinasi faktor internal dan eksternal:

- a. Arus Kas yang Tidak Sehat Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, terutama bila piutang tak tertagih atau stok menumpuk, cepat menggerus kemampuan membayar kewajiban.

- b. Struktur Utang yang Buruk Ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi tanpa perencanaan pengembalian yang matang meningkatkan beban bunga dan risiko gagal bayar.
- c. Manajemen Keuangan Lemah Kurangnya pencatatan akuntansi, minimnya perencanaan anggaran, serta pengendalian biaya yang lemah membuat UMKM sulit memantau posisi keuangan dan merespons perubahan pasar.
- d. Tekanan Eksternal - Kenaikan harga bahan baku, gangguan pasokan, perubahan kebijakan pemerintah, atau resesi ekonomi dapat menurunkan pendapatan dan menambah beban biaya.
- e. Adaptasi Digital yang Lambat - Di era transformasi digital, UMKM yang enggan mengadopsi teknologi pemasaran, manajemen, dan transaksi nontunai rentan kehilangan pelanggan dan efisiensi, sehingga laba tergerus.

Beberapa prinsip yang sering muncul sebelum insolvensi antara lain: menurunnya margin laba secara konsisten, keterlambatan pembayaran tagihan, penurunan tajam arus kas operasional, dan meningkatnya ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Deteksi dini melalui laporan keuangan berkala – seperti rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas – sangat penting agar langkah perbaikan bisa segera diambil.

Pembangunan infrastruktur membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, akses jalan, logistik, dan konektivitas digital yang lebih baik dapat menekan biaya dan memperluas pasar. Namun di sisi lain, infrastruktur baru memudahkan masuknya pemain besar dan meningkatkan persaingan harga, yang bisa menurunkan pendapatan UMKM yang tidak siap. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan strategi misalnya melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, atau digitalisasi penjualan lebih rentan terhadap insolvensi.

Mencegah insolvensi memerlukan disiplin keuangan dan ketangguhan model bisnis. Beberapa langkah penting antara lain:

- a. Memperketat manajemen arus kas, termasuk pemantauan harian dan proyeksi jangka menengah.
- b. Diversifikasi sumber pendapatan dan pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau mitra.
- c. Negosiasi ulang syarat kredit dan pengaturan ulang jadwal pembayaran ketika menghadapi tekanan keuangan.
- d. Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas basis pelanggan.

Menggunakan prinsip peringatan dini seperti Altman Z-Score atau model ekonometrik berbasis IPAT untuk menilai risiko kebangkrutan sejak dini. Dengan memahami dinamika insolvensi, UMKM dapat memandangnya bukan hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai pemicu pembenahan manajemen dan strategi. Ketahanan menghadapi guncangan eksternal, dukungan kebijakan pemerintah, serta akses ke pembiayaan yang inklusif menjadi faktor penting agar UMKM mampu keluar dari tekanan insolvensi dan tetap menjadi pilar perekonomian lokal yang berkelanjutan. Secara konseptual, risiko kebangkrutan adalah probabilitas atau kemungkinan terjadinya kegagalan keuangan (*financial distress*) yang dapat berujung pada penghentian operasi usaha. Risiko ini tidak hanya disebabkan oleh faktor keuangan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti persaingan, perubahan kebijakan, maupun dampak pembangunan infrastruktur yang dapat mengubah pola pasar dan distribusi.

BAB

5

RISIKO KEBANGKRUTAN

A. Prinsip Risiko Kebangkrutan

Untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan, digunakan sejumlah prinsip keuangan maupun non-keuangan. Prinsip ini membantu UMKM mendeteksi dini kerentanan usaha sebelum benar-benar jatuh pada kondisi insolvensi.

1. Prinsip Keuangan

- a. Likuiditas rendah: Ditunjukkan dengan rasio lancar (current ratio) atau rasio cepat (quick ratio) yang rendah, menandakan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek.
- b. Leverage tinggi: Proporsi utang yang terlalu besar dibandingkan ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) meningkatkan beban bunga dan memperbesar risiko gagal bayar.
- c. Profitabilitas negatif atau menurun: Penurunan Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), atau Return on Equity (ROE) secara terus-menerus menjadi sinyal awal financial distress.
- d. Arus kas operasional negatif: Meskipun penjualan meningkat, jika arus kas dari aktivitas utama tidak mencukupi untuk membayar kewajiban, risiko kebangkrutan semakin tinggi.

- e. Ketergantungan pada pinjaman jangka pendek: UMKM yang terlalu mengandalkan kredit modal kerja tanpa adanya strategi pengelolaan keuangan jangka panjang lebih rentan terhadap kebangkrutan.

2. Prinsip Non Keuangan

- a. Manajemen yang lemah: Kurangnya perencanaan strategis, keterbatasan kapasitas manajerial, atau konflik internal dapat memperburuk kondisi usaha.
- b. Ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar: UMKM yang gagal merespons tren konsumen, digitalisasi, atau persaingan baru akibat infrastruktur lebih rentan mengalami kegagalan usaha.
- c. Ketergantungan pada satu produk atau pasar: Diversifikasi yang minim membuat UMKM sangat bergantung pada segmen tertentu; jika terjadi guncangan permintaan, risiko kebangkrutan meningkat.
- d. Faktor eksternal: Perubahan kebijakan, krisis ekonomi, bencana alam, hingga pembangunan infrastruktur yang menggeser lokasi pusat perdagangan atau konsentrasi konsumen dapat memperbesar risiko insolvensi.

Dalam pembahasan akademik, terdapat beberapa model yang sering digunakan untuk memprediksi risiko kebangkrutan, seperti:

1. Altman Z-Score, yang mengukur probabilitas kebangkrutan berdasarkan kombinasi rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas.
2. Springate Model, yang dikembangkan untuk mengidentifikasi *financial distress* pada usaha kecil dan menengah.
3. Zmijewski Model, yang menekankan analisis profitabilitas, leverage, dan likuiditas dalam memprediksi kebangkrutan.

Bagi UMKM, model-model tersebut bisa disederhanakan agar sesuai dengan keterbatasan data keuangan, namun tetap memberikan gambaran awal tentang potensi risiko insolvensi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, risiko kebangkrutan dapat meningkat jika UMKM:

1. tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lokasi pasar,
2. menghadapi kompetisi dari usaha yang lebih besar, atau
3. gagal memanfaatkan peluang akses pasar baru.

Sebaliknya, UMKM yang mampu mengantisipasi risiko melalui manajemen keuangan yang sehat, inovasi produk, serta diversifikasi pasar justru dapat mengurangi potensi kebangkrutan dan menjaga keberlanjutan usahanya. Dengan demikian, risiko kebangkrutan bagi UMKM bukan sekadar ancaman finansial, melainkan gambaran kerentanan struktural dan manajerial yang harus dikelola dengan cermat, terutama dalam era transformasi ekonomi akibat pembangunan infrastruktur.

Prediksi insolvensi merupakan upaya sistematis untuk mendeteksi potensi kegagalan keuangan sebelum kondisi tersebut benar-benar terjadi. Bagi UMKM, kemampuan memproyeksikan risiko kebangkrutan sangat penting karena sebagian besar pelaku usaha bekerja dengan modal terbatas, arus kas yang fluktuatif, dan ketergantungan tinggi pada permintaan pasar lokal. Model prediksi yang akurat dapat menjadi “alarm dini” sehingga pemilik usaha, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan dapat melakukan langkah pencegahan atau intervensi tepat waktu. Model prediksi insolvensi biasanya memanfaatkan data historis keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasi pola yang berkorelasi dengan kebangkrutan.

Di konteks UMKM, faktor non-keuangan seperti kualitas manajemen, inovasi produk, atau kemampuan adopsi teknologi digital juga relevan karena berdampak langsung pada daya saing. Dalam konteks pembangunan infrastruktur dan transformasi digital, model berbasis IPAT ($\text{Impact} = \text{Population} \times \text{Affluence} \times \text{Technology}$) yang dikombinasikan dengan pendekatan ekonometrik menawarkan keunggulan tambahan.

Sementara itu, insolvensi adalah kondisi ketika suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya meskipun telah menjual seluruh aset yang dimiliki. Berbeda

dengan *financial distress* yang masih memungkinkan adanya pemulihan, insolvensi menandakan tahap lebih serius yang dapat berujung pada kebangkrutan. Bagi UMKM, insolvensi kerap terjadi akibat kombinasi dari lemahnya manajemen keuangan, tingginya beban utang, menurunnya profitabilitas, serta keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan alternatif. Oleh karena itu, diperlukan model prediksi insolvensi yang mampu mendeteksi potensi kegagalan usaha sejak dini, sehingga UMKM dapat mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

B. Peran Ekonometrika pada UMKM

Dalam konteks UMKM terdampak pembangunan infrastruktur, model prediksi insolvensi perlu mempertimbangkan beberapa hal:

1. Keterbatasan data keuangan: tidak semua UMKM memiliki laporan keuangan formal, sehingga model sederhana seperti Springate atau Zmijewski lebih praktis diterapkan.
2. Faktor non-keuangan: adaptasi model bisa ditambahkan dengan faktor kualitatif seperti akses pasar, perubahan pola usaha, dan ketergantungan pada infrastruktur tertentu.
3. Prediksi sebagai sistem peringatan dini: tujuan penerapan model bukan untuk menyatakan kebangkrutan secara absolut, melainkan sebagai *early warning system* agar UMKM dapat segera memperbaiki strategi.

Penggunaan model prediksi insolvensi pada UMKM memberikan beberapa manfaat strategis:

1. Identifikasi dini risiko finansial sehingga dapat segera dilakukan restrukturisasi utang atau efisiensi biaya.
2. Meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan karena adanya pengukuran risiko yang objektif.
3. Mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional, dengan memadukan analisis keuangan dan faktor keberlanjutan.

4. Membantu pemerintah dan lembaga pendukung UMKM dalam menentukan prioritas intervensi, khususnya pada kelompok usaha yang paling rentan terdampak pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, model prediksi insolvensi bukan hanya alat analisis akademik, tetapi juga dapat menjadi instrumen praktis untuk memperkuat daya tahan dan keberlanjutan UMKM di tengah perubahan lingkungan bisnis akibat pembangunan infrastruktur. Ekonometrika memainkan peran strategis dalam pembahasan UMKM karena menghubungkan teori ekonomi dengan data empiris secara sistematis. Dalam konteks keberlanjutan UMKM, peran ini menjadi sangat penting mengingat usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi tekanan kompetitif yang tinggi, risiko insolvensi, serta perubahan lingkungan bisnis akibat pembangunan infrastruktur dan transformasi digital.

Salah satu peran utama ekonometrika adalah mengukur pengaruh faktor-faktor kunci terhadap kinerja UMKM. Misalnya, model ekonometrika dapat digunakan untuk menilai sejauh mana jumlah tenaga kerja (population), daya beli konsumen (affluence), dan adopsi teknologi (technology) memengaruhi profitabilitas dan stabilitas finansial. Dengan cara ini, penulis tidak hanya sekadar melihat hubungan kausalitas secara teoritis, tetapi juga dapat mengestimasi besarnya pengaruh dan probabilitas kejadian, seperti risiko gagal bayar atau insolvensi. Selain itu, ekonometrika memungkinkan identifikasi faktor risiko dan peluang strategis. Melalui pengolahan data kuantitatif, penulis dapat mengetahui faktor mana yang secara signifikan meningkatkan atau menurunkan kinerja UMKM. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat, baik oleh pelaku usaha sendiri maupun oleh pembuat kebijakan. Misalnya, jika hasil menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi secara signifikan meningkatkan profitabilitas, maka program pelatihan digital atau subsidi teknologi dapat difokuskan untuk memperkuat daya saing UMKM. Ekonometrika juga berperan dalam prediksi

dan simulasi skenario. Secara keseluruhan, peran ekonometrika dalam pembahasan UMKM meliputi tiga aspek utama:

1. Analisis kuantitatif untuk memahami pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal terhadap kinerja usaha.
2. Identifikasi risiko dan peluang yang dapat dijadikan dasar strategi operasional maupun kebijakan publik.
3. Prediksi dan simulasi untuk merancang skenario pengembangan usaha dan mitigasi risiko secara berbasis data.

Dengan demikian, ekonometrika bukan sekadar alat statistik, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memahami dinamika UMKM secara menyeluruh, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan memastikan keberlanjutan usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam keberlanjutan UMKM terdampak pembangunan infrastruktur, ekonometrika memiliki relevansi strategis karena:

1. Mengukur hubungan empiris antara faktor populasi, profitabilitas, adopsi teknologi, dan keberlanjutan usaha.
2. Mengidentifikasi faktor dominan yang paling memengaruhi risiko insolvensi UMKM.
3. Membuktikan hipotesis dalam konteks UMKM dengan data nyata.
4. Menyediakan dasar prediksi mengenai prospek keberlanjutan UMKM di masa depan jika kondisi populasi, affluence, atau teknologi berubah.

Dengan demikian, ekonometrika menegaskan bahwa pembahasan tentang keberlanjutan UMKM tidak cukup hanya dilihat dari perspektif kualitatif. Dibutuhkan pendekatan kuantitatif melalui model ekonometrik agar hubungan antarfaktor dapat diukur secara nyata, teruji, dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi serta kebijakan.

C. Pengukuran Kinerja UMKM

Pengukuran kinerja UMKM menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan keberlanjutan usaha, baik dari sisi finansial maupun operasional. Profitabilitas dan risiko insolvensi merupakan dua prinsip utama yang saling terkait: profitabilitas tinggi menunjukkan efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba, sementara risiko insolvensi mencerminkan kerentanan terhadap kegagalan finansial. Dalam praktiknya, pengukuran ini memerlukan kombinasi prinsip keuangan tradisional, model prediksi berbasis ekonometrika, dan aplikasi digital modern untuk hasil yang akurat, cepat, dan relevan.

Dalam hal profitabilitas, prinsip klasik yang sering digunakan mencakup Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), margin laba bersih, dan rasio laba terhadap omzet. Prinsip-prinsip ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien UMKM menggunakan modal, aset, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan keuntungan. Lebih dari sekadar angka, pengukuran profitabilitas dapat dilihat secara trend untuk melihat perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, maupun melalui benchmarking terhadap rata-rata industri atau kelompok usaha sejenis, sehingga UMKM dapat menilai posisi kompetitif mereka dalam ekosistem bisnis. Sementara itu, insolvensi atau risiko kebangkrutan memerlukan pendekatan yang lebih prediktif.

Model Z-Score atau regresi logit/probit sering digunakan untuk memperkirakan probabilitas gagal bayar berdasarkan kombinasi prinsip keuangan seperti leverage, likuiditas, profitabilitas, dan arus kas. Model-model ini memungkinkan UMKM dan pemangku kepentingan, seperti lembaga keuangan atau pembuat kebijakan, untuk mengidentifikasi usaha yang berisiko tinggi, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih awal. Dengan kata lain, pengukuran insolvensi bukan hanya bersifat evaluatif, tetapi juga bersifat prediktif dan strategis. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas kemampuan pengukuran profitabilitas dan insolvensi. Saat ini, software akuntansi modern dan platform berbasis cloud

memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, pembuatan laporan keuangan otomatis, dan perhitungan rasio keuangan dengan cepat.

Beberapa aplikasi bahkan menyediakan modul peringatan dini (early warning system) yang dapat mendeteksi ketidakseimbangan finansial, tren negatif dalam arus kas, atau potensi risiko insolvensi. Hal ini sangat membantu UMKM untuk mengambil langkah korektif sebelum masalah menjadi lebih serius. Selain itu, penggunaan dashboard digital dan business intelligence tools semakin memudahkan kinerja secara menyeluruh. Visualisasi data memungkinkan pemilik UMKM untuk melihat tren profitabilitas, perubahan biaya operasional, dan proyeksi risiko insolvensi secara intuitif.

Data yang terintegrasi juga mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti investasi dalam teknologi baru, restrukturisasi modal, atau diversifikasi produk, sehingga kinerja usaha dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, aplikasi pengukuran ini tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan lembaga pendukung UMKM. Dengan data yang terstruktur dan akurat, pemerintah dan lembaga keuangan dapat merancang program intervensi yang tepat sasaran, seperti pemberian kredit, pelatihan manajemen, atau dukungan teknologi, sehingga UMKM yang rentan dapat memperoleh bantuan sebelum menghadapi kegagalan finansial. Dengan demikian, aplikasi untuk mengukur profitabilitas dan insolvensi menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kombinasi antara prinsip keuangan klasik, model prediktif, dan teknologi digital memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi, memitigasi risiko, dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, terutama di tengah perubahan pasar, persaingan yang semakin ketat, dan transformasi digital yang cepat. Ekonometrika tidak hanya berfungsi sebagai alat pemahaman teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam mengukur faktor penting yang menentukan keberlanjutan

usaha. Dua aspek yang sangat relevan dalam pembahasan UMKM terdampak pembangunan infrastruktur adalah profitabilitas dan insolvensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amado Mateus, M., Guzmán Rincón, A., & Cuero Acosta, Y. A. (2024). Influence of reputation, innovation, and knowledge on the performance of MSMEs in the orange economy sector. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2388227>
- Anisa, K., Prasetyo, P. K., & Pujiriyani, D. W. (2021). Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera pada Kondisi Penghidupan Masyarakat di Desa Serdang. *Tunas Agraria*, 4(3), 340–351. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.154>
- Cheng, Y., Zhou, X., & Li, Y. (2023). The effect of digital transformation on real economy enterprises' total factor productivity. *International Review of Economics and Finance*, 85(January), 488–501. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.02.007>
- Chontanawat, J. (2018). Decomposition analysis of CO2 emission in ASEAN: An extended IPAT model. *Energy Procedia*, 153, 186–190. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.10.057>
- Dawkins, C. J. (2003). Regional development theory: Conceptual foundations, classic works, and recent developments. *Journal of Planning Literature*, 18(2), 131–171. <https://doi.org/10.1177/0885412203254706>
- Dietz, T., & Rosa, E. A. (1997). Effects of population and affluence on CO2 emissions. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 94(1), 175–179. <https://doi.org/10.1073/pnas.94.1.175>
- Dira, A. F., Utomo, K. P., Finanto, M., Bangun, A., & Yani, E. (2023). *Pengaruh Investasi dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Kalimantan Timur*. 11(2), 1437–1446.
- Egere, O. M., Maas, G., & Jones, P. (2025). Assessing the impact of MSMEs entrepreneurial competency on transformational entrepreneurship in a developing economy. *Entrepreneurship*

and Regional Development, 00(00), 1–20.
<https://doi.org/10.1080/08985626.2025.2515288>

- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). The Results of PLS-SEM Article information. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Handyastono, B., Alghoul, M. A., Rizki, A., Djambek, N. P., Kusuma, M. S. B., Kuntoro, A. A., Harlan, D., Nugroho, E. O., Munthe, H. M., Hazmi, M., Wisanggeni, D. H., & Rizqy, M. A. (2025). Flood hazard assessment in Pemaluan Village due to land use change in IKN (Ibu Kota Nusantara) as the New Capital City of Indonesia. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*, 11(January), 101211.
<https://doi.org/10.1016/j.cscee.2025.101211>
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*. Unissula Press.
http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210303041/6318UMKM_dan_Bentuk_-_Bentuk_Usaha.pdf
- Harta, R., Diana, B. A., Azis, Y. M. A., & Andri, Y. (2020). Policy Brief STRATEGI KEBIJAKAN PENATAAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA BARU (STUDI KASUS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA) (ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBU KOTA NEGARA). In *Universitas Terbuka*.
https://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2019/policy_brief_wujudkan_keadilan_sosial_dalam_jkn.pdf
- Hidayat, A., Hadid, M., & Hijriah. (2024). Planning, Optimization and Development of River Transportation in Supporting The Development of Mega City IKN, Balikpapan and Samarinda. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1353(1).
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012006>

- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1-55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Hua, T., Zhao, W., Cherubini, F., Hu, X., & Pereira, P. (2021). Sensitivity and future exposure of ecosystem services to climate change on the Tibetan Plateau of China. *Landscape Ecology*, 36(12), 3451-3471. <https://doi.org/10.1007/s10980-021-01320-9>
- Indonesia, P. (2023). Mewujudkan Cita-Cita Bersama Laporan Pencapaian 2023 Otorita Ibu Kota Nusantara. *JDIH Kementerian PUPR*, 99, 1-55.
- Joy-Camacho, W., & Thornhill, I. (2024). Opportunities and limitations to environmental management system (EMS) implementation in UK small and medium enterprises (SMEs) - A systematic review. *Journal of Environmental Management*, 367(June). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121749>
- Julkovski, D. J., Sehnem, S., Bennet, D., & Leseure, M. (2021). Ecological Modernization Theory (EMT): Antecedents and Successors. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 5(2). <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v5i2.303>
- Krisna, P., & Nuratama, P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. In *Penerbit CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- Li, S., Zhang, Y., Wang, Z., & Li, L. (2018). Mapping human influence intensity in the Tibetan Plateau for conservation of ecological service functions. *Ecosystem Services*, 30, 276-286. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.003>
- Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., & Ali, F. (2020). 20 years of research on virtual reality and augmented reality in tourism context: A text-mining approach. *Tourism Management*, 77(September 2018). <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104028>

- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Meng, T., Li, Q., He, C., & Dong, Z. (2025). Research on the configuration path of manufacturing enterprises' digital servitization transformation. *International Review of Economics and Finance*, 98(February). <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103952>
- Naik, P., Nail, G. R., & Patil, M, B. (2021). *Conceptualizing Python in Google COLAB* (Issue January). <https://www.researchgate.net/publication/357929808>
- Nguyen, N. M., Sun, S., & Welters, R. (2024). The impact of FDI on R&D investment of small and medium-sized enterprises in Vietnam: The role of institutions. *International Review of Economics and Finance*, 95(August), 103519. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103519>
- Nurhidayati, Tohari, I., Muawarah, hanik S., Dewi, E. P., & Hakim, A. R. (2022). BUNGA RAMPAI IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA. In *Politeknik Keuangan Negara STAN*. <https://penerbitan.pknstan.ac.id/wp-content/uploads/2023/01/IKN-NUSANTARA.pdf>
- Paramananda, D., Iskandar, D. A., Perencanaan, M., Teknik, F., Mada, U. G., No, J. G., & Yogyakarta, D. I. (2024). TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT BALIKPAPAN DALAM PEMBANGUNAN IKN NUSANTARA (LEVEL OF BALIKPAPAN COMMUNITY READINESS ON IKN NUSANTARA DEVELOPMENT) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 menjelaskan bahwa. *Riset Pembangunan*, 7, 50–65.
- PPN/Bappenas. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8hcREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=%22pencabutan+hak%22+%22politik+mantan+terpidana%22&ots=0wHEDPKAV8&sig=Nz3t0OVrQibw1WSxR7mIO7mUiXc>

- Purnanandam, A. (2008). Financial distress and corporate risk management: Theory and evidence. *Journal of Financial Economics*, 87(3), 706–739. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.04.003>
- Ramadhan, R., Marzuki, M., Suryanto, W., Sholihun, S., Yusnaini, H., & Muharsyah, R. (2024). Rainfall variability in Indonesia new capital associated with the Madden-Julian Oscillation and its contribution to flood events. *Quaternary Science Advances*, 13(January), 100163. <https://doi.org/10.1016/j.qsa.2024.100163>
- Ramkalawon Veerapen Chetty, D., Boojhawon, R., Bhagwant, S., & Levy, L. (2024). Factors affecting the occupational safety and health of small and medium enterprises in the Construction Sector of Mauritius. *Social Sciences and Humanities Open*, 10(May), 100964. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100964>
- Rezky, Z. I., Hajji, A. M., & Siswanto, H. (2023). Evaluasi Efektivitas Layanan Pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Dalam Memenuhi Kepuasan Pengguna. *Bentang: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 11(2), 139–150. <https://doi.org/10.33558/bentang.v11i2.5957>
- Ritonga, H. M., Fikri, M. El, Siregar, N., Agustin, R. R., & Hidayat, R. (2020). *Manajemen Pemasaran Konsep dan Strategi*.
- Rodríguez-Gulías, M. J., Fernández-López, S., & Rodeiro-Pazos, D. (2024). Foreign knowledge sources and innovation: Differences across large and small and medium-size multinational enterprises (MNEs). *International Review of Economics and Finance*, 92(February), 741–757. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.02.036>
- Ruas, P., Tol, J., Pt, D. I., Marga, J., Jakarta-tangerang, P. T. B. K. C., Ghaisani, F. A., Njatrijani, R., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *DIPONEGORO LAW REVIEW Jalan Tol melalui Peraturan Menteri*. 5(43), 1–12.

- Sahir, S. H. (2020). *Pemasaran Global*. Universitas Medan Area.
- Saleh, A., Djakfar, L., & Wicaksono, A. (2025). Development of Road Networks to Support the Development of the Government Center in the Capital City of Nusantara (IKN). *Rekayasa Sipil*, 19(2), 178–190. <https://doi.org/10.21776/ub.rekayasipil.2025.019.02.6>
- Saleh, M. Y., & Said, M. (2019). Konsep Dan Strategi Pemasaran. In *SAH Media* (Vol. 3). Sah Media.
- Smith Purba, A. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kota Balikpapan. *Forum Ekonomi Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 26(4), 751–757.
- Sri, H., Sukesi, & Kanty, H. (2019). Manajemen UMKM dan Koperasi: Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai. *Unitomo Press*, 1–245.
- Sudiyono, Kurniawati, M., & Mustikowati, R. I. (2018). *Manajemen Pemasaran Usaha Wisata*.
- Sunindyo, W. D., Alfrojems, Septian, D., Rachmawati, R., & Senses, D. I. (2024). Should we build a metaverse for the new capital of Indonesia? *Heliyon*, 10(7), e29037. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29037>
- Supratman, H. F. D., Pratama, H. A., Setiawan, B., Pratama, M. A., Sucipta, S., Nur, S. H., Ekaningrum, N. E., Nurliati, G., Hikmat, M. C. C., Setiawan, A., Pamungkas, N. S., Putra, Z. P., & Yusuf, M. (2025). Sorption and diffusion studies of radiocesium in soil samples from Ibu Kota Nusantara region of Indonesia. *Environmental Chemistry and Ecotoxicology*, 7(October 2024), 252–262. <https://doi.org/10.1016/j.enceco.2024.12.008>
- Susanti, E., Mulyanti, R. Y., & Wati, L. N. (2023). MSMEs performance and competitive advantage: Evidence from women's MSMEs in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2239423>

- Utomo, Kurniawan Prambudi, Faroman, S., Winardi, M. A., Fadly, R., Widjaja, W., Setyorini, R., & Tiris. (2018). Dasar Manajemen dan Kewirausahaan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 3, Issue 1).
- Wibowo, M., & Aumeboonsuke, V. (2020). Bank financial capability on MSME lending amid economic change and the growth of Fintech companies in Indonesia. *Thailand and the World Economy*, 38(2), 63–87.
- Wilantara, R. F., & Indrawan, R. (2016). Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM. In *Serambinews.com*.
- Winardi, M. A., Dira, A. F., & Utomo, K. P. (2024). *Mengembangkan Green Job dan Soft Skill: Pengaruh Strategi Pariwisata Berkelanjutan untuk Peningkatan Layanan di Jawa Barat*. 12(1), 13–27.
- Zainuri, Z., Yasin, M. Z., Amijaya, R. N. F., Wilantari, R. N., & Vipindrartin, S. (2025). The role of government policy on the performance of MSMEs in the creative industry: evidence from Jember Regency, East Java, Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2446657>
- Zhao, Z. (2024). Digital Transformation and Enterprise Risk-Taking. *Finance Research Letters*, 62(January), 104036. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105139>
- Zhou, Z., Zhang, J., & He, C. (2025). Manufacturing enterprise digital transformation, manager cognition, and strategic Risk-Taking—Evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 98(August 2024), 103906. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.103906>

GLOSARIUM

Affluence

Tingkat kemakmuran atau daya beli masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi dan konsumsi.

Altman Z-Score

Metode analisis keuangan untuk memprediksi potensi kebangkrutan (insolvensi) perusahaan atau UMKM dengan menggabungkan beberapa rasio keuangan seperti likuiditas, profitabilitas, dan leverage.

Digitalisasi UMKM

Proses adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung aktivitas operasional, pemasaran, distribusi, dan manajemen keuangan.

Ekonometrik

Pendekatan kuantitatif yang memadukan teori ekonomi, matematika, dan statistika untuk menguji hubungan serta membuat prediksi, misalnya antara faktor infrastruktur dan profitabilitas UMKM.

Eksternalitas Lingkungan

Dampak positif atau negatif yang dialami masyarakat atau ekosistem akibat kegiatan ekonomi atau pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur yang mengubah tutupan lahan.

Infrastruktur

Sarana fisik dan sistem pendukung seperti jalan, jembatan, jaringan transportasi, dan utilitas yang memungkinkan aktivitas ekonomi dan sosial berjalan lancar.

Insolvensi

Kondisi ketika sebuah entitas usaha tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya atau berpotensi bangkrut karena ketidakmampuan membayar utang.

IPAT (Impact = Population × Affluence × Technology)

Model analitis yang digunakan untuk mengukur dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan.

Keberlanjutan (Sustainability)

Kemampuan suatu usaha atau sistem untuk terus berjalan dan berkembang dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Likert Scale (Skala Likert)

Metode pengukuran dalam survei yang menilai tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap suatu pernyataan, biasanya menggunakan skala 1-5 atau 1-7.

Profitabilitas

Kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, biasanya diukur dengan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA) atau Net Profit Margin (NPM).

Teknologi

Kemampuan, metode, dan perangkat – baik fisik maupun digital – yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Kategori pelaku usaha dengan skala aset, pendapatan, dan jumlah tenaga kerja tertentu sesuai peraturan pemerintah Indonesia; merupakan pilar penting perekonomian nasional.

TENTANG PENULIS



Kurniawan Prambudi Utomo, S.E., M.M adalah Pria kelahiran Jakarta, tahun 1981, sebagai mahasiswa Program Pascasarjana S3 Manajemen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan menyelesaikan Pendidikan di Universitas Bhayangkara Jaya, Jurusan Manajemen (2011), menikah dengan Tri Margiwati, S.P dan dikarunia anak, Azzam Ahmed Fatihrizmal (AAF) dan Najmadina Ayesha Sarahturahma (NAS), saat ini aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, telah menghasilkan beberapa buku di antaranya, manajemen dan bisnis dan beberapa *Book Chapter* bidang ekonomi manajemen, selain itu penulis aktif dalam menulis jurnal nasional dan sebagai *reviewer* jurnal ekonomi pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang (Sinta 3), dan mendapat hibah Program Penulisan Fundamental Reguler (PFR) dan hibah Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Kemendikdisaintek tahun 2025. Penulis dapat dihubungi dengan email: kurniawan.kpu@bsi.ac.id.



Muhammad Aziz Winardi N, S.T., M.M. adalah pria yang menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Brawijaya, Malang dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana dengan konsentrasi bidang konsentrasi, Manajemen Operasional. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Manajemen dan Bisnis STIE GICI dan terlibat dalam berbagai kegiatan penulisan serta pengabdian masyarakat. Dalam kiprahnya sebagai akademisi, Beliau telah menulis dan memublikasikan artikel di berbagai jurnal nasional terakreditasi, menjadi penulis untuk beberapa jurnal bidang ekonomi dan manajemen, serta berkontribusi dalam penulisan beberapa *book chapter* yang berfokus pada isu manajemen operasional, keberlanjutan UMKM,

pembangunan ekonomi daerah, dan digitalisasi bisnis. Beliau juga menerima dukungan pendanaan riset melalui skema Program Penulisan Fundamental Reguler (PFR) serta program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi dengan email: azizwinardi@stiegi.ac.id



Dr. Suhardoyo, S.E., M.M. adalah pria yang menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan meraih gelar Doktor (S3) bidang Manajemen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan fokus penulisan pada Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini Dr. Suhardoyo aktif sebagai dosen dan penulis di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Beliau terlibat dalam berbagai penulisan terkait manajemen, ekonomi pembangunan, dan keberlanjutan UMKM, serta menjadi **reviewer** jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional. Dalam kiprahnya, Dr. Suhardoyo telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan *book chapter*, khususnya di bidang manajemen strategis, kewirausahaan, dan ekonomi regional. Beliau juga memperoleh dukungan pendanaan riset melalui program Penulisan Fundamental Reguler (PFR) dan program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: suhardoyo.syo@bsi.ac.id.



Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi, M.Si. menempuh pendidikan Sarjana Psikologi Universitas Persada YAI, Jakarta dan meraih gelar Magister Psikologi Universitas Persada YAI, Jakarta dengan konsentrasi Psikologi. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Faluktas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengajar mata kuliah terkait Character Building dan Psikologi. Selain

mengajar, Mic Finanto Ario Bangun aktif dalam berbagai penulisan yang berfokus pada strategi pengembangan bisnis, serta menjadi reviewer di beberapa jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Beliau juga berkontribusi dalam penulisan sejumlah buku dan book chapter di bidang manajemen dan bisnis, serta mendapatkan pendanaan riset melalui Program Penulisan Fundamental Reguler (PFR) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: mic.fianto@dsn.ubharajaya.ac.id.